

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

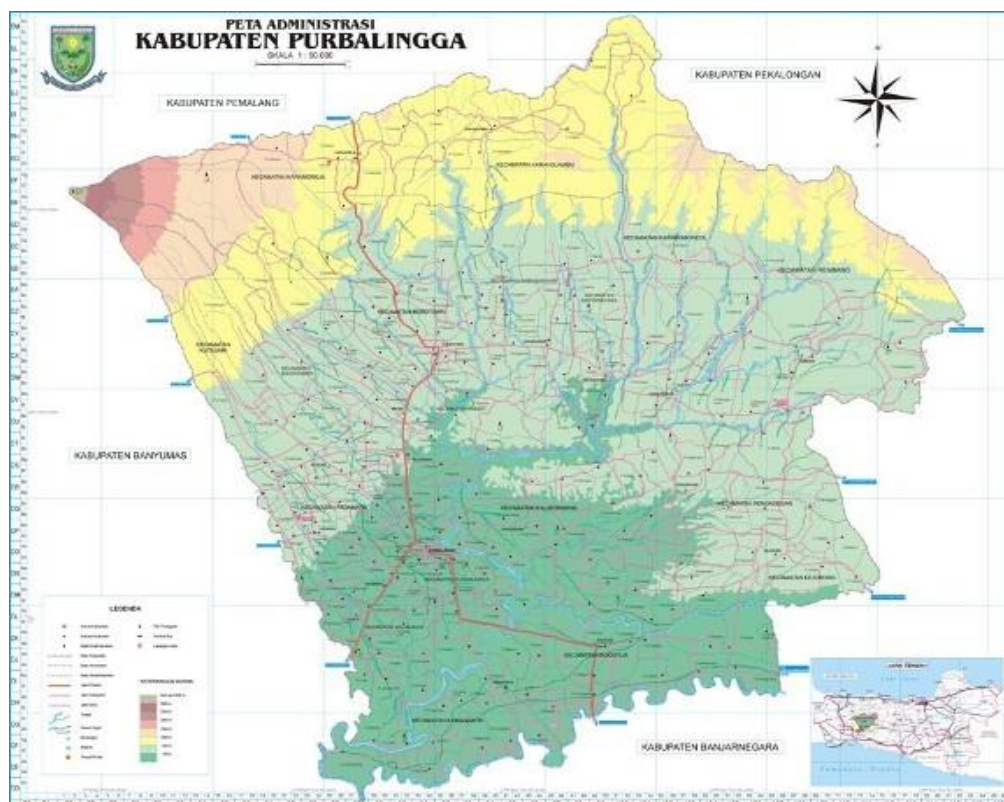
2.1. Gambaran Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (\pm 3.254 ribu Ha). Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.546 RW dan 5.069 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki enam rukun warga dan 21 rukun tetangga.

Wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara; Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan; Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Pada bagian Selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).



Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada posisi 109°13'-109°35' Bujur Timur dan 7°10'-7°29' Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi sejauh 191 km.

C. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi wilayah dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, dengan ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut. Secara garis besar, topografi wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam dua karakteristik wilayah, yakni :

1. Bagian utara merupakan wilayah berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.
2. Bagian selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0–25 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

D. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass. Struktur geologi yang berkembang di beberapa wilayah berupa kemiringan lapisan dan sesar. Sesar yang ditemukan di Satuan Batulempung – Batupasir yang diperkirakan memiliki umur Pliosen Akhir – Pleistosen.

E. Kondisi Klimatologi

Selama tahun 2016 Purbalingga memiliki rata-rata curah hujan 2.502 mm yang terendah selama lima tahun terakhir dan suhu udara berkisar 22°C - 33°C. Selama tahun 2016 ada satu bulan yang benar-benar tidak turun hujan, yaitu pada bulan September. Sedangkan banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret.

F. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Serayu, Sub-DAS Pekacangan dan Klawing dengan anak-anak sungai sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Sungai Ponggawa | 8. Sungai Tungtunggunung |
| 2. Sungai Gemuruh | 9. Sungai Laban |
| 3. Sungai Kajar | 10. Sungai Kuning |
| 4. Sungai Lemberang | 11. Sungai Wotan |
| 5. Sungai Tlahab | 12. Sungai Gintung |
| 6. Sungai Soso | 13. Sungai Tamba |
| 7. Sungai Lebak | 14. Sungai Muli. |

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan peruntukan pertanian; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan permukiman; dan (9) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi seluas kurang lebih 629 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 4.727 hektar. Sebaran hutan produksi meliputi wilayah 6 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 52 hektar;
2. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 44 hektar;
3. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 203 hektar;
4. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 218 hektar;
5. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 23 hektar.
6. Kecamatan lainnya seluas kurang lebih 89 hektar.

Sedangkan sebaran kawasan hutan produksi terbatas, meliputi 10 wilayah kecamatan di Purbalingga, yaitu :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 174 hektar;
2. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 22 hektar;
3. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1. hektar;
4. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 590 hektar;
7. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 507 hektar;
8. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 13 hektar;

9. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 400 hektar;
10. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 1.393 hektar.

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 30.536 hektar, yang meliputi 16 wilayah kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.527 hektar;
2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.527 hektar;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 611 hektar;
4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.527 hektar;
5. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.527 hektar;
6. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 4.580 hektar;
7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.527 hektar;
8. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 4.580 hektar;
9. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 2.290 hektar;
11. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 153 hektar;
12. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.527 hektar;
13. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 2.290 hektar;
14. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.290 hektar;
15. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 2.290 hektar; dan
16. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.290 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perkebunan; dan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 25.207 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 16.030 hektar dan lahan kering kurang lebih seluas 9.177 hektar, yang sebaran wilayahnya meliputi :

1. Kecamatan Bobotsari, kurang lebih seluas 1.437 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 910 hektar dan lahan kering seluas 527 hektar;
2. Kecamatan Bojongsari, kurang lebih seluas 1.352 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 1.086 hektar dan lahan kering seluas 266 hektar;
3. Kecamatan Bukateja kurang lebih seluas 2.591 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 1.740 hektar dan lahan kering seluas 851 hektar;
4. Kecamatan Kaligondang kurang lebih seluas 1.732 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 868 hektar dan lahan kering seluas 864 hektar;
5. Kecamatan Kalimanah kurang lebih seluas 1.314 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 679 hektar dan lahan kering seluas 635 hektar;
6. Kecamatan Karanganyar kurang lebih seluas 1.539 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 268 hektar dan lahan kering seluas 1.271 hektar;

7. Kecamatan Karangjambu kurang lebih seluas 794 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 319 hektar dan lahan kering seluas 475 hektar;
8. Kecamatan Karangmoncol kurang lebih seluas 1.909 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih seluas 1.235 hektar dan lahan kering 674 hektar;
9. Kecamatan Karangreja kurang lebih 202 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 85 hektar dan lahan kering kurang lebih 117 hektar;
10. Kecamatan Kejobong kurang lebih 474 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 382 hektar dan lahan kering kurang lebih 93 hektar;
11. Kecamatan Kemangkon kurang lebih 2.883 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 1.938 hektar dan lahan kering kurang lebih 945 hektar;
12. Kecamatan Kertanegara kurang lebih 1.215 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 1.122 hektar dan lahan kering kurang lebih 92 hektar;
13. Kecamatan Kutasari kurang lebih 1.164 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 1.025 hektar dan lahan kering kurang lebih 139 hektar;
14. Kecamatan Mrebet kurang lebih 2.032 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 1.997 hektar dan lahan kering kurang lebih 35 hektar;
15. Kecamatan Padamara kurang lebih 1.233 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 720 hektar dan lahan kering kurang lebih 514 hektar;
16. Kecamatan Pengadegan kurang lebih 154 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 55 hektar dan lahan kering kurang lebih 99 hektar;
17. Kecamatan Purbalingga kurang lebih 714 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 259 hektar dan lahan kering kurang lebih 455 hektar; dan
18. Kecamatan Rembang kurang lebih 2.468 hektar, terdiri dari lahan basah kurang lebih 832 hektar dan lahan kering kurang lebih 1.634 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 22.616 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Sementara kawasan Pertanian hortikultura seluas kurang lebih 172.887 hektar meliputi: Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bobotsari; dan Kecamatan Padamara.

Sebaran sektor Perkebunan meliputi wilayah dan komoditas sebagai berikut :

1. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 29 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kelapa dalam, dan tebu;
2. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 3.584 hektar, meliputi komoditas kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo dan tebu;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 22 hektar, meliputi komoditas kelapa dalam, melati gambir, dan tebu;
4. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 5.060 hektar, meliputi komoditas kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo, dan tebu;
5. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 194 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, karet, cengkeh, dan kapulaga;
6. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 175 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, kapulaga, tebu, kakao, cengkeh, mlinjo, dan nilam;
7. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 404 hektar, meliputi kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, kapulaga, tebu, dan cengkeh;
8. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 830 hektar, meliputi komoditas kelapa dalam, kopi robusta, lada, mlinjo, dan tebu;
9. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 1.779 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, casieavera (kayu manis), nilam, teh, pandan, lada, panili, kapuk randu, kapulaga, dan cengkeh;
10. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 246 hektar, meliputi komoditas kopi robusta, glagah arjuna, casieavera, teh, cengkeh, dan kapulaga;
11. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 988 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, pandan, lada, kapulaga, mlinjo, tebu, dan kakao;
12. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 555 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, panili, mlinjo, dan tebu;
13. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 503 hektar, meliputi komoditas kelapa dalam, kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, lada, panili, kapulaga, mlinjo, tebu, dan cengkeh;
14. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 69 hektar, meliputi komoditas glagah arjuna, casieavera, nilam, mlinjo, dan kopi robusta; dan
15. Kecamatan Kutasari kurang lebih 322 hektar, meliputi komoditas kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, teh, lada, mlinjo, jarak pagar, dan cengkeh.

Kawasan peruntukan Peternakan meliputi wilayah sebagai berikut :

1. Ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda, sebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Padamara, dan Kecamatan Rembang;
2. Ternak hewan kecil berupa kambing dan domba, sebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, dan Kecamatan Rembang;
3. Ternak unggas berupa ayam, itik, dan angsa, sebarannya meliputi Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Padamara, dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: (1) kawasan budidaya perikanan darat seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar meliputi kawasan pembenihan yang berada di Kecamatan Kutasari; kawasan pembesaran yang berada di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Padamara; kawasan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari; dan kawasan produksi pakan yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari. Sementara itu kawasan pengolahan ikan berada di Kecamatan Purbalingga.

Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan mineral non logam dan batuan seluas kurang lebih 15 hektar berada di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 298 hektar meliputi: Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja; Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon; Desa Majapura dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari; Desa Jetis Kecamatan Kemangkon; Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon; Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah; Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan

Karangreja; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Kaligondang; dan Kecamatan Padamara. Sementara itu industri kecil dan mikro menyebar di kawasan permukiman.

Kawasan peruntukan pariwisata di Purbalingga, terdiri atas:

1. Pariwisata alam, meliputi Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, dan Agrowisata Serang.
2. Pariwisata budaya meliputi:
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman berada di Kecamatan Rembang;
 - b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 - c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - d. Wisata Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Wisata Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - f. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja dan Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - g. Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Desa Wisata Karangbanjar yang berada di Kecamatan Bojongsari.
3. Pariwisata buatan meliputi:
 - a. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kolam Renang Tirta Asri yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kecamatan Padamara; dan
 - d. Sanggaluri *Park* yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.
4. Pariwisata Minat Khusus meliputi :
 - a. Desa Wisata Agropolitan Serang Kecamatan Karangreja
 - b. Desa Wisata Panusupan Kecamatan Rembang
 - c. Desa Wisata Tanalum Kecamatan Rembang
 - d. Desa Wisata Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

Kawasan peruntukan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

1. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di PKL, PKLp, PPK, dan PPL.
2. Kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan. meliputi: Pangkalan Udara Wirasaba yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon; Bataliyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga; instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan medan latihan militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

H. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) lokasi kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan.

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar meliputi:

1. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
3. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
4. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
5. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
6. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja;

Kawasan rawan bencana tanah longsor seluas 16.510 hektar, meliputi:

1. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
4. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, Desa Margasana, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;
5. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
6. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
7. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
8. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;

9. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
10. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana kekeringan seluas kurang lebih 29.044 hektar meliputi:

1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
5. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
6. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
11. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang;
12. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet seluas kurang lebih 8.015 hektar meliputi:

1. Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
2. Desa Pengalusan, Desa Binangun, dan Desa Sangkanayu yang berada di Kecamatan Mrebet;
3. Desa Bumisari dan Desa Metenggeng yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
4. Desa Karangjengkol, Desa Candinata, Desa Candiwulan, dan Desa Cendana yang berada di Kecamatan Kutasari.

Kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar meliputi:

1. Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Majasem, Desa Senon, Desa Pelumutan, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Pagerandong, Desa Sidanegara, Desa Arenan, Desa Sempor Lor, Desa Brecek, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangreja, Desa Candinata, Desa Karangklesem, Desa Karangcegak, Desa Sumingkir, Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Munjul yang berada di Kecamatan Kutasari;
4. Desa Pekalongan, Desa Beji, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
5. Desa Banjarsari, Desa Tlagayasa, Desa Majapura, Desa Karangduren, Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, dan Desa Gunungkarang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
6. Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor, dan Desa Gondang yang berada di Kecamatan Karangreja;
7. Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Sirandu, Desa Karangjambu, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
8. Desa Ponjen, Desa Krangean, Desa Langkap, Desa Kalijaran, Desa Brakas, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, dan Desa Cipaku yang berada di Kecamatan Mrebet;
10. Desa Kejobong, Desa Pangempon, Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan yang berada di Kecamatan Kejobong;
11. Desa Tetel, Desa Tumanggal, Desa Bedagas, Desa Larangan, dan Desa Karangjoho yang berada di Kecamatan Pengadegan;
12. Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Panusupan, dan Desa Wanogara Kulon yang berada di Kecamatan Rembang;

- 13. Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol;
- 14. Desa Purbayasa, Desa Bojanegara, dan Kelurahan Karangsantul yang berada di Kecamatan Padamara;
- 15. Desa Bukateja, Desa Bajong, dan Desa Kutawis yang berada di Kecamatan Bukateja; dan
- 16. Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Mewek, Desa Selabaya, dan Desa Babakan yang berada di Kecamatan Kalimanah.

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun 2015 sebanyak 903.181 jiwa, terdiri dari 446.258 laki-laki dan 456.923 perempuan. Dengan proporsi tersebut maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar 97,67 persen. Sedangkan banyaknya rumah tangga mencapai 225.116 atau rata- rata anggota per rumah tangga 4,01 orang.

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, setiap km² lahan di Purbalingga rata-rata dihuni sekitar 339 rumah tangga. Dengan rata-rata setiap rumah tangga terdiri atas empat orang anggota rumah tangga, maka dalam setiap km² wilayah Purbalingga memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.363 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2015 sebagaimana dalam table berikut ini.

Tabel 2.1.
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin (ribu) Gender (thousand)			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
	Male	Female	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kemangkon	27 150	28 251	55 401	0,96
2 Bukateja	34 366	35 053	69 419	0,98
3 Kejobong	21 778	23 083	44 861	0,94
4 Pengadegan	18 361	18 959	37 320	0,97
5 Kaligondang	28 306	30 523	58 829	0,93
6 Purbalingga	28 715	30 327	59 042	0,95
7 Kalimanah	26 332	27 031	53 363	0,97
8 Padamara	20 751	21 754	42 505	0,95
9 Kutasari	29 118	29 403	58 521	0,99
10 Bojongsari	29 741	29 411	59 152	1,01
11 Mrebet	34 404	35 092	69 496	0,98
12 Bobotsari	24 547	24 936	49 483	0,98
13 Karangreja	20 784	20 869	41 653	1,00
14 Karangjambu	12 555	12 343	24 898	1,02
15 Karanganyar	17 889	17 980	35 869	0,99
16 Kertanegara	15 567	15 965	31 532	0,98
17 Karangmoncol	25 908	26 086	51 994	0,99
18 Rembang	29 986	29 857	59 843	1,00
Purbalingga	446 258	456 923	903 181	0,98

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2016, BPS Kabupaten Purbalingga

Selama kurun waktu 5 tahun, meski kecil laju penambahan penduduk Purbalingga mengalami perlambatan, dari 1,14 persen pada tahun 2011 menjadi 1,02 persen pada tahun 2015. Namun demikian, pertumbuhan penduduk tersebut masih cukup tinggi dan harus ditekan sampai di bawah 1 persen. Bila dilihat dari kelahiran kasar (CBR) dan kematian kasar (CDR), angkanya dari tahun-ketahun terlihat relatif konstan. Dalam periode tahun 2013-2015, angka kelahiran (CBR) berada pada posisi yang sama yaitu diangka 14 (empat belas). Hal ini menjelaskan bahwa dalam 1000 penduduk terdapat 14 kelahiran. Sedangkan untuk angka kematian (CDR) selama tahun 2013-2015 juga stagnan di angka 6 (enam). Angka ini menjelaskan bahwa dari 1000 penduduk terjadi 6 peristiwa kematian.

Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Purbalingga selama 3 (tiga) tahun terakhir cukup fluktuaktif. Tahun 2013, angka ketergantungan Kabupaten Purbalingga sebesar 53. Artinya bahwa setiap seratus penduduk usia produktif, harus menanggung 53 penduduk yang tidak produktif. Pada Tahun 2014, angka tersebut naik menjadi 55 dan tahun 2015 turun menjadi 52.

Kondisi kependudukan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2,2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Kondisi Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (000)	884.683	894.062	903.181
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,10	1,06	1,02
3	Sex Ratio (L/P) (%)	97,69	97,68	97,67
4	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	1,327	1,341	1,363
5	Angka Kelahiran/1000 penduduk	14,98	14,27	14,84
6	Angka Kematian/1000 penduduk	6,83	6,67	6,26
7	Jumlah Rumah Tangga	223.658	223.836	225.116
8	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	4,0	4,02	4,01
9	Angka Ketergantungan	53	55	52

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2016, BPS Kab. Purbalingga

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan menggunakan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini juga dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha (PDRB) di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku tahun 2015 tercatat sebesar 18.565.114,2 juta rupiah. Sedangkan PDRB 2015 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 14.255.939,7 juta rupiah. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Gambaran peranan PDRB menurut Lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana dalam tabel 2.3 di bawah.

Tabel 2.3.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011 - 2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.80	29.64	29.83	29.74	29.80
B	Pertambangan dan Penggalian	4.70	4.66	4.63	4.86	5.09
C	Industri Pengolahan	24.16	24.97	24.81	25.52	25.72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
F	Konstruksi	5.68	5.79	5.72	5.68	5.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.12	13.44	13.27	12.60	12.31
H	Transportasi dan Pergudangan	3.05	2.97	2.98	3.03	3.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.27	2.26	2.21	2.23	2.28
J	Informasi dan Komunikasi	1.64	1.72	1.64	1.58	1.56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.23	2.28	2.25	2.15	2.11
L	Real Estate	1.06	1.02	1.04	1.03	1.03
M	Jasa Perusahaan	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.05	3.07	2.98	2.82	2.78
O	Jasa Pendidikan	4.18	5.18	5.57	5.64	5.51
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.93	0.97	0.98	0.99
Q	Jasa lainnya	1.86	1.74	1.78	1.82	1.75
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kab. Kabupaten Purbalingga, 2016

Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa Lapangan Usaha Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar dalam menyumbang PDRB Kabupaten Purbalingga. Tercatat hingga 2015, sumbanganya masih berada dikisaran 30 persen. Sumbangan terbesar selanjutnya adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 26 persen. Sumbangan terendah diberikan oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang pada tahun 2015 hanya memberikan peran sebesar 0,04 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015 mencapai 5,39 persen. Capaian tersebut tidak selaju dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 5,86 persen. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013. Secara lebih jelas, PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga			
	Berlaku		Berlaku	
	Jumlah (Juta Rp.)	Jumlah (Juta Rp.)	Jumlah (Juta Rp.)	Jumlah (Juta Rp.)
2011	12.205.358,9	12,40	11.474.221,2	5,67
2012	13.448.654,2	10,19	12.138.445,3	5,79
2013	14.791.295,7	9,98	12.778.311,2	5,27
2014	16.756.045,2	13,28	13.526.936,6	5,86
2015	18.565.114,2	10,80	14.255.939,7	5,39

Sumber : PDRB Kab. Kabupaten Purbalingga 2011-2015

B. PDRB Perkapita

Pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut akan menghasilkan PDRB per kapita. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 20.663.951 atau Rp. 1.721.995 per bulan, dengan pertumbuhan sebesar 9,66 persen. Selama 6 tahun terakhir, pertumbuhan PDRB perkapita terendah berada di tahun 2011 yang tumbuh kurang dari 9 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, sebesar 12,09 persen. Hal tersebut sebagaimana di uraikan dalam tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2010 - 2015

TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Pertahun	Perbulan	Pertahun	Perbulan
2010	12.763.238	1.063.603	12.763.238	1.063.603
2011	14.182.449	1.181.870	13.332.877	1.111.073
2012	15.453.320	1.287.776	13.947.811	1.162.317
2013	16.810.582	1.400.881	14.522.788	1.210.232
2014	18.843.658	1.570.304	15.212.239	1.267.686
2015	20.663.951	1.721.995	15.867.613	1.322.301

Sumber : PDRB 2015, Badan Pusat Statistik

C. Laju inflasi

Laju inflasi tahun kalender Desember 2016 sebesar 2,39 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2015 sebesar 1,90 persen sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pada Bulan Desember 2016, terjadi inflasi sebesar 0,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 127,85. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka bulan Nopember 2016 dimana anhgka inflasinya sebesar 0,60 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 127,61. Dua kota SBH di Jawa Tengah yang dekat dengan Purbalingga juga mengalami inflasi, yaitu Kota Cilacap sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 127,81 dan Kota Purwokerto sebesar 0,37 persen dengan IHK 123,23. Inflasi juga terjadi di Jawa Tengah sebesar 0,21 persen dengan IHK sebesar 124,71.

Inflasi disebabkan kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,45 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,30 persen; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen dan kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan 0,23 persen.

Sedangkan deflasi yang disebabkan penurunan harga ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok sandang sebesar 0,61 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah daging ayam ras, lele, telur ayam ras, kangkung, kentang, labu siam, terong panjang, jeruk, bawang putih, cabai rawit, rokok kretek.

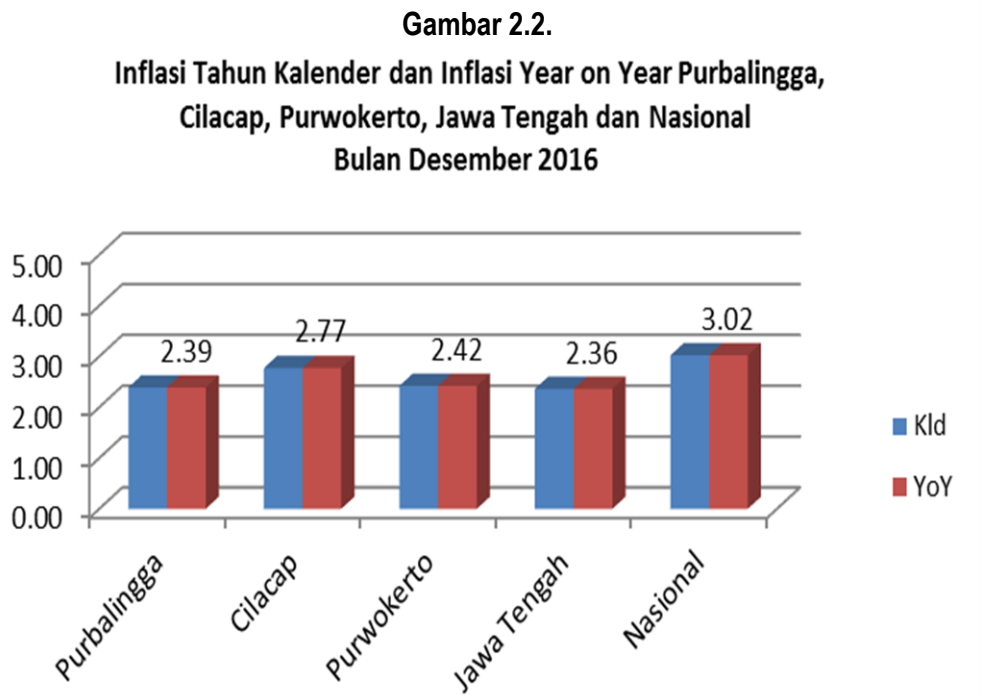
Tabel 2.6

Indeks Harga Konsumen (2012 = 100) Kota Purbalingga Bulan Desember 2016, perubahan terhadap bulan sebelumnya (%), terhadap bulan Desember 2015 (%), terhadap 12 bulan sebelumnya /Year on Year (%) dan Andil Inflasi (%)

Kelompok / Sub Kelompok	IHK Desember 2016	% perubahan thd bulan sebelumnya	Andil Inflasi (%)	INFLASI (%)		Andil Inflasi YOY
				TH Kld 2016	Year on year	
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(5)	(6)
UMUM	127.85	0.18	0.18	2.39	2.39	2.39
I BAHAN MAKANAN	146.48	0.45	0.11	5.02	5.02	1.20
II MKN JADI,MNM, ROKOK& TEMB	122.06	0.30	0.06	5.10	5.10	0.99
III PERMH,AIR,LISTRIK GAS & BHN BAKAR	129.53	0.05	0.01	2.79	2.79	0.63
IV SANDANG	120.17	-0.61	-0.04	1.44	1.44	0.09
V KESEHATAN	112.78	0.12	0.01	2.59	2.59	0.12
VI PENDIDIKAN, REKREASI & OR	107.10	-0.02	0.00	3.93	3.93	0.29
VII TRAN, KOM & JASA KEUANGAN	127.74	0.23	0.03	-5.86	-5.86	-0.93

Sumber : BPS, 2016

Laju inflasi kalender Kota Purbalingga sebesar 2,39 persen lebih rendah dari laju inflasi Kota Purwokerto sebesar 2,42 persen, Kota Cilacap 2,77 persen dan lebih tinggi dari Jawa Tengah (2,36 persen). Grafik inflasi Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Purwokerto, Jawa tengah dan nasional dapat dilihat sebagaimana dalam gambar 2.2. di bawah ini.

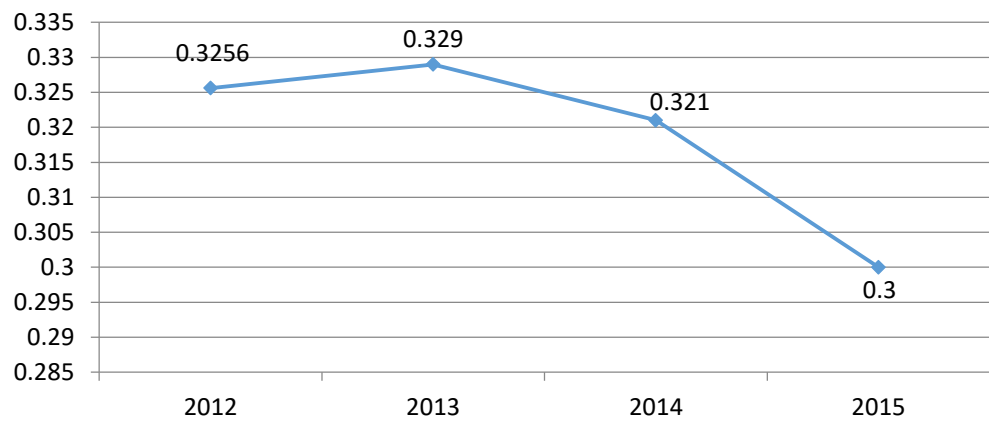


D. Indeks Gini

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah koefisien / indeks gini (*gini ratio*). Berdasarkan data Susenas Tahun 2015, menunjukkan bahwa indeks gini untuk Kabupaten Purbalingga adalah 0,30. Artinya bahwa ketimpangan pendapatan di Purbalingga cukup rendah atau pemerataan cukup tinggi karena masih dibawah 0,35. Indeks ini semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 0,32. Gambaran tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam.

Sementara itu, indeks gini untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,38 pada tahun 2015 yang mencerminkan ketimpangan pendapatan tergolong sedang. Indeks ini sedikit menurun dibanding tahun 2014 sebesar 0,39. Adapun perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.3.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2011-2014

E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Jika dilihat berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang sama yaitu tingkat ketimpangan rendah atau pemerataan tinggi. Terlihat bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 ternyata sudah menerima 22,57 persen dari total pendapatan kabupaten. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 21,02 persen dan tahun 2012 sebesar 20,60 persen, yang menunjukkan bahwa perkembangan pemerataan pendapatan di Purbalingga semakin baik, sebagaimana ditunjukkan tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7.
Indikator Pemerataan Pendapatan Kabupaten Purbalingga

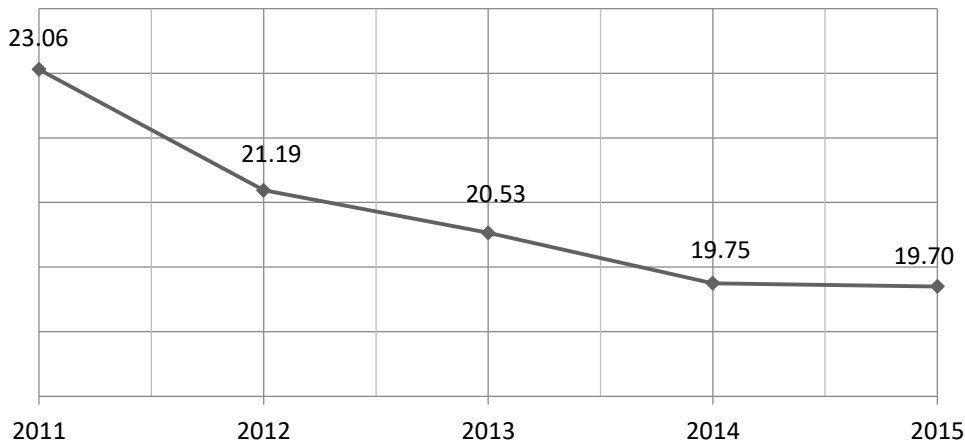
Kriteria Bank Dunia	2012	2013	2014
- 40 % rendah	20,60	21,02	22,57
- 40 % sedang	34,12	37,44	37,11
- 20 % tinggi	45,28	41,54	40,32

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2012-2014

F. Penduduk Miskin dan IPM

1. Penduduk Miskin

Penduduk miskin Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sebesar 23,06 persen, dan penduduk miskin tahun 2015 tercatat sebanyak 19,70 persen. Persentase penduduk miskin dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan seperti terlihat pada gambar 2.4 di bawah ini, yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga semakin berkurang.



Gambar 2.4.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011-2015

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 176,49 ribu orang (19,70 persen), dengan garis kemiskinan sebesar 283.366 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 176,04 ribu orang (19,75 persen) maka jumlah penduduk miskin telah menurun sekitar 0,05 persen. Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8.
Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, 2011-2015

Karakteristik Kemiskinan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk miskin (ribu)	196,0	181,3	181,1	176,04	176,49
Persentase penduduk miskin	23,06	21,19	20,53	19,75	19,70
Garis kemiskinan (Rp/kp/bln)	230.461	247.508	265.262	275.022	283.366

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah (2011-2015)

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan level atau peringkat pembangunan suatu wilayah. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penghitungan IPM tahun 2015 sudah menggunakan metode baru dengan tetap mengukur 3 (tiga) aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 25+) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan: 96 komoditas PPP). Selain tahun 2015 dengan metode baru dapat dihitung nilai IPM lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9.
Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, 2011-2015

Kabupaten	Nilai IPM					Ranking IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Cilacap	64,73	65,72	66,80	67,25	67,77	23	23	21	21	22
Banyumas	67,45	68,06	68,55	69,25	69,89	16	16	16	16	16
Purbalingga	64,33	64,94	65,53	66,23	67,03	25	25	26	26	27
Banjarnegara	61,58	62,29	62,84	63,15	64,73	33	33	33	33	33
Kebumen	64,05	64,47	64,86	65,67	66,87	28	29	29	29	28
Jawa Tengah	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	14	15	13	13	12

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah

IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2015 tercatat 67,03. Secara nilai, IPM Kabupaten Purbalingga terus meningkat setiap tahunnya seperti tahun 2015 lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya 66,23. Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Pada tabel 8.2 dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,63 pada tahun 2011 menjadi 72,69 pada tahun 2012, dan terus meningkat lagi hingga menjadi 72,81 pada tahun 2015.

Bidang pendidikan diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk harapan lama sekolah ada peningkatan dari 10,84 pada tahun 2011 menjadi 10,98 pada tahun 2012 dan terus naik pada tahun 2015 menjadi 11,78. Rata-rata lama sekolah tahun 2011 adalah 6,33 tahun naik menjadi 6,84 pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 6,85 pada tahun 2015.

Sementara itu, besarnya paritas daya beli penduduk Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita 96 komoditas. Tahun 2011 tercatat sebesar 8,228 ribu rupiah, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2015 tercatat sebesar 8,938 ribu rupiah. Komponen IPM Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Komponen IPM Kabupaten Purbalingga, 2011-2015

Komponen IPM	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,63	72,69	72,76	72,80	72,81
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,84	10,98	11,10	11,51	11,78
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,33	6,44	6,68	6,84	6,85
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8,228	8,450	8,535	8,539	8,938

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

G. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu. APK Kabupaten Purbalingga menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2013	2014	2015
SD (7-12 tahun)	112,53	118,84	118,77
SMP (13-15 tahun)	82,64	89,63	85,08
SM (16-18 tahun)	36,81	52,47	75,29

Sumber : Susenas 2013-2015

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, APK SD mengalami kenaikan dari 112,53 pada tahun 2013 meningkat menjadi 118,84 pada tahun 2014 dan 118,77 pada tahun 2015. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun.Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diumur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun).

Untuk APK SMP mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014 yaitu dari 82,64 menjadi 89,63, namun kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 85,08. APK SMP yang masih dibawah nilai 100 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 13-15 tahun belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SMP. Hal yang sama terjadi juga pada kelompok umur 16-18 tahun yang belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SM (Sekolah Menengah). Namun demikian untuk tingkat SM, APK cenderung terus meningkat selama 2013 hingga 2015.

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2015, APK SD untuk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi

sekolah di SD bagi kaum laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat SMP dan SM, APKperempuan lebih tinggi dari APK laki-laki.

Tabel 2.12.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
SD	121,54	115,64	118,77
SMP	84,41	85,98	85,08
SMA	72,11	78,05	75,29

Sumber : Susenas 2015

H. Angka Partisipasi Murni

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak sekolah di suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini dihitung dengan perbandingan antara jumlah murid umur tertentu pada pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Purbalingga, 2013-2015

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2013	2014	2015
SD	96,76	97,28	98,06
SMP	74,07	79,78	79,50
SM	34,97	44,08	58,66

Sumber : Susenas 2013-2015

Pada tabel di atas terlihat bahwa APM Kabupaten Purbalingga tahun 2015 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 98,06; untuk SMP adalah 79,50 dan untuk tingkat SM adalah 58,66. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD 98,06 menunjukkan bahwa sebanyak 98,06 persen penduduk usia 7-12 tahun yang saat ini sedang bersekolah di SD. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun. APK SMP 79,50 artinya ada sebanyak 79,50 persen penduduk usia 13-15 tahun yang saat ini sedang sekolah

di SMP. APK Sekolah Menengah (SM) 58,66 berarti ada sebanyak 58,66 persen penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SM. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
SD	97,63	98,56	98,06
SMP	78,90	80,31	79,50
SM	55,48	61,42	58,66

Sumber : Susenas 2015

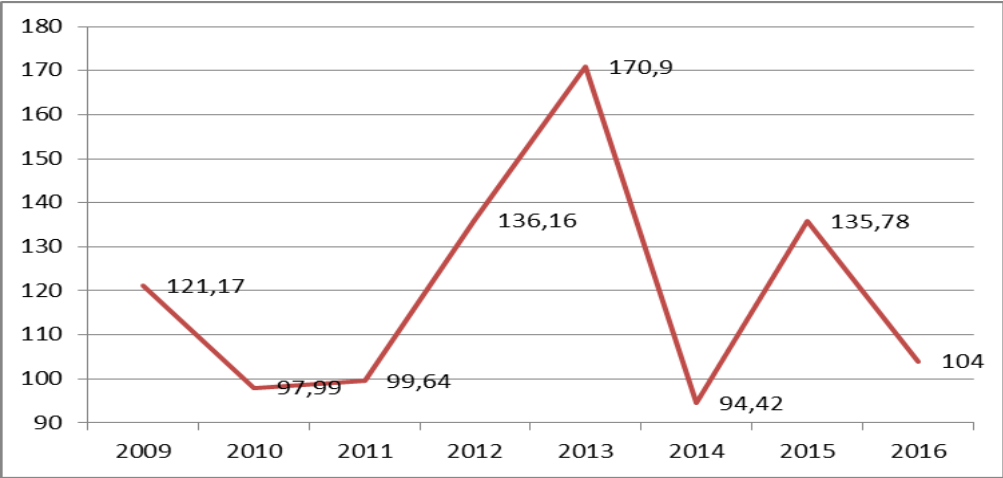
Untuk kondisi tahun 2015 pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SM, APM perempuan lebih tinggi dari laki-laki. APM SD perempuan 98,56 menunjukkan bahwa dari seluruh perempuan 7-12 tahun, yang sedang bersekolah di tingkat SD sebanyak 98,56 persen. Sedangkan laki-laki yang berumur 7-12 tahun sebanyak 97,63 persen sedang bersekolah di tingkat SD. APM SMP perempuan 80,31 menunjukkan bahwa 80,31 persen dari perempuan umur 13-15 tahun sedang bersekolah di SMP, sementara 78,90 persen laki-laki umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP.

APM SD pada tahun 2015 sebesar 98,06 persen sementara APK SD pada tahun 2015 sebesar 118,77 artinya terdapat sebesar 20,71 persen anak SD yang berumur kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun.

I. Kasus/ Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus kematian Ibu mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa menghitung lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar 15 kasus atau 104,6 per 100.000 kelahiran hidup. Dibanding dengan tahun 2015 sebesar 20 kasus atau 135,78 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu tahun 2016 mengalami penurunan cukup signifikan. Angka Kematian Ibu untuk delapan tahun terakhir di Purbalingga sebagaimana gambar di bawah ini.

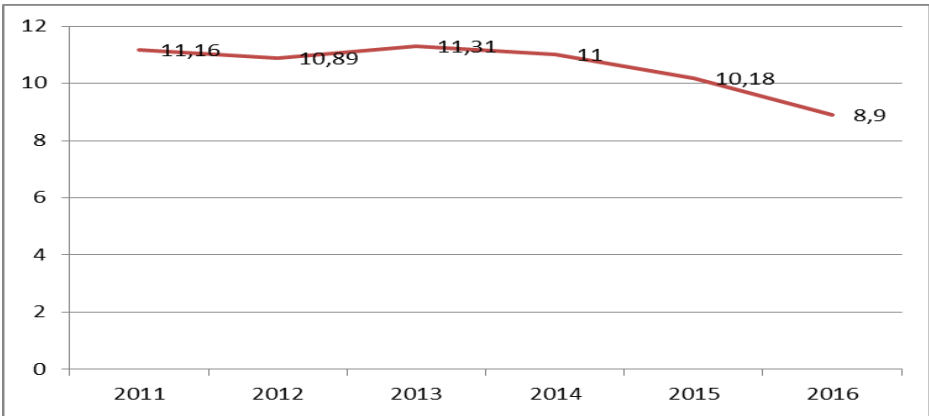


Gambar 2.5.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga
dalam 8 tahun terakhir 2009 – 2016

Kematian ibu terjadi karena kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga pelayanan kegawatdaruratan tidak tepat waktu disebabkan keterlambatan mengenal tanda bahaya dan pengambilan keputusan. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri yang terkait dengan tingkat sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang sering diistilahkan dengan 4 (empat) terlalu dan 3 (tiga) terlambat yakni (terlalu tua pada saat hamil; terlalu muda pada saat hamil; terlalu banyak anak; terlalu rapat jarak kehamilan) dan (terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat tertangani; terlambat sampai ke tempat rujukan karena kendala transportasi; dan terlambat mendapatkan penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia).

J. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2012-2016 mengalami perbaikan. AKB di Kabupaten Purbalingga tahun 2012, 2013 dan 2014 secara berturut-turut sebesar 182 kasus, 172 kasus dan 162 kasus. Pada tahun 2015 AKB turun menjadi 149 kasus atau 10,18 per 1.000 KH dan tahun 2016 menjadi 129 kasus atau 8,9 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan konginental pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tren Angka Kematian Bayi dalam enam tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar di bawah ini.

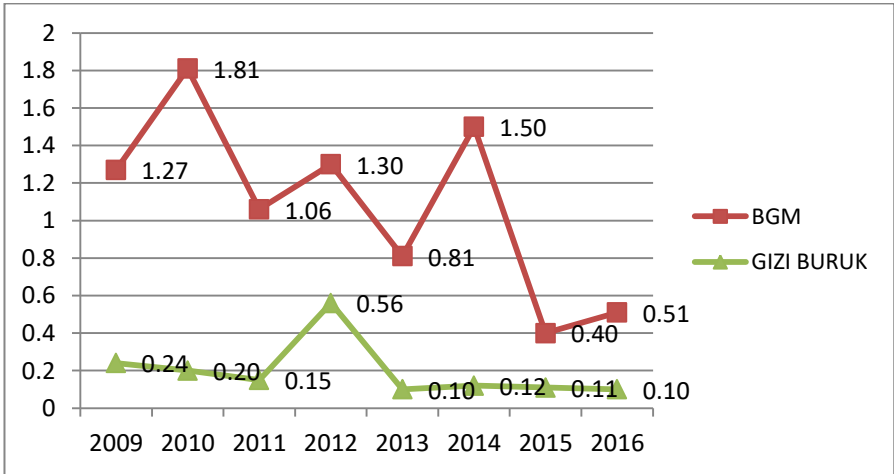


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga

Gambar 2.6.
Tren Angka Kematian Bayi 2011 – 2016

K. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif, dari 0,11 % pada Tahun 2012, naik lagi menjadi 0,81 % pada tahun 2013, dan mengalami penurunan menjadi 0,13 % pada Tahun 2014, serta 0,11 % pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sebesar 0,10 % atau 58 kasus gizi buruk dan Balita BGM sebanyak 298 kasus (0,51%) dan semuanya telah mendapatkan penanganan. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Tren BGM (BB/U) dan Gizi Buruk (BB/TB) Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dalam gambar grafik berikut ini.



Gambar 2.7.
Tren BGM dan Gizi Buruk Tahun 2009-2016

L. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data Sakernas 2015 mencatat bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Purbalingga sebesar 4,84 yang artinya terdapat sebanyak 4,84 persen penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Pada tahun 2015 persentase laki-laki yang menganggur lebih banyak dibanding perempuan, demikian juga pada tahun 2014. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum telah terjadi penurunan pengangguran terutama pada perempuan yaitu dari 5,13 persen menjadi 4,84 persen pada tahun 2015. Dengan kata lain penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2015 lebih dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran perempuan seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja perempuan yang mencari pekerjaan. Kondisi ini bisa saja terjadi karena di Kabupaten Kabupaten Purbalingga banyak kegiatan industri yang menyerap tenaga kerja perempuan seperti industri rambut palsu dan bulu mata palsu sehingga sangat sedikit dari kaum perempuan di Kabupaten Purbalingga yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015

Jenis Kelamin	Tahun	
	2014	2015
Laki-laki	6,82	6,86
Perempuan	2,80	1,79
Total	5,13	4,84

Sumber : Sakernas 2014-2015

M. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2015 tercatat sebesar 68,05 yang mengindikasikan

bahwa terdapat 68,05 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, Tahun 2014 dan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2014 -2015

Jenis Kelamin	Tahun	
	2014	2015
Laki-laki	84,18	83,81
Perempuan	58,36	53,02
Total	70,95	68,05

Sumber : Sakernas 2014-2015

Bila dibandingkan dengan tahun 2014 pada tabel 2.16, TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2015 mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja yaitu dari 70,95 pada tahun 2014 menjadi 68,05 pada tahun 2015. Jika diamati lebih teliti, maka penurunan TPAK ini lebih banyak terjadi pada tenaga kerja perempuan kurang lebih 4 persen yaitu dari 58,36pada tahun 2014 menjadi 53,02 pada tahun 2015; sementara TPAK laki-laki hanya turun kurang lebih 1 persen.

- 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
- A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
- a. Pendidikan Dasar
- 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada jenjang SD sederajat, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 APS SD/MI sebesar 98,82 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 104,96 persen. Pada jenjang SMP/MTs, APS sebesar 72,33 persen pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 92,38 pada tahun 2016. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana Tabel berikut ini

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan
Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI (7-12 th)	98,82	95,86	121,74	103,68	104,96
2	SMP/MTs (13-15 th)	72,33	91,12	97,12	92,32	92,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Pada jenjang SD sederajat, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 APK SD/MI sebesar 86,72 persen dan pada tahun 2016 menjadi 110,34 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, APM SD/MI sebesar 86,72 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,61 persen. Perrkembangan APK dan APM SD/MI sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18.
Perkembangan APK dan APM SD sederajat
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Angka Partisipasi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APK	86,72	87,29	130,80	108,89	110,34
2	APM	86,72	87,29	101,98	90,89	92,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Pada jenjang SMP sederajat, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 APK SMP sederajat sebesar 90,06 persen dan pada tahun 2016 menjadi 100,36 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, APM SMP sederajat sebesar 50,50 persen dan pada tahun 2016 menjadi 69,40 persen. Perkembangan APK dan APM SMP sederajat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19.
Perkembangan APK dan APM SMP sederajat
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Angka Partisipasi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APK	90,06	94,65	100,68	99,80	100,36
2	APM	50,50	72,32	101,98	69,30	69,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

2) **Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah**

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami perubahan. Pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 tersedia SD / MI sebanyak 648 unit dan pada tahun 2016 tetap berjumlah 646 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2012 terdapat 111 unit sekolah pada tahun 2016 menjadi 114 unit sekolah karena terdapat pendirian beberapa sekolah baru. Hal tersebut sebagaimana Tabel dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SD/MI	648	647	647	644	646
2	Jumlah SMP/MTs	111	112	112	115	114
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	97.888	98.306	91.069	91.990	91.247
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	48.204	48.406	45.027	45.473	44.510

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2012-2016, rasio tersebut mengalami peningkatan dari 66.09 menjadi 70.91. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan dari 23.23 menjadi 25,61 per 10.000 siswa. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	66,10	65,81	70,72	70,23	70,91
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	23,23	23,34	24,87	25,29	25,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2013-2016, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 18,09 menjadi 15,63, yang menggambarkan ketersediaan guru belum memenuhi kondisi ideal. Kondisi berbeda pada jenjang SMP/MTs, yaitu rasio menurun dari 19,56 pada tahun 2013 menjadi 18,49 pada tahun 2016. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap murid cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan rasio guru dan murid di Kabupaten Purbalingga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

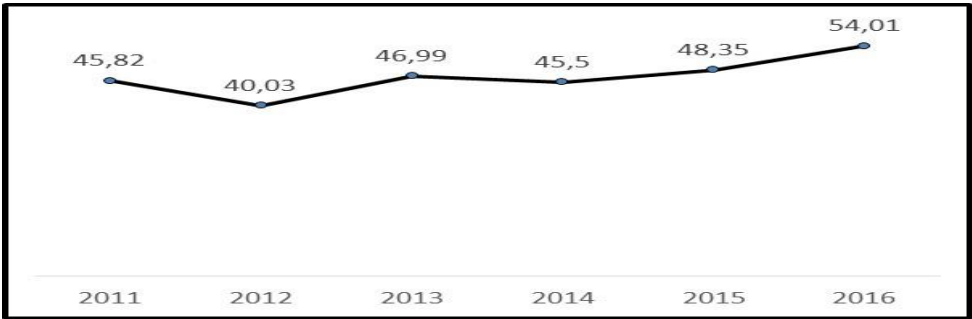
No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
I	SD/MI					
	Jumlah guru	5.412	6.317	6.883	5.868	5.839
	Jumlah murid	97,888	98,306	91,069	91,990	91,247
	Rasio	18,09	15,56	13,23	15,68	15,63
II	SMP/MTs					
	Jumlah guru	2.630	2.343	2.407	2.436	2.416
	Jumlah murid	43.412	45.818	45.333	45.381	44.672
	Rasio	16,51	19,56	18,83	18,63	18,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

b. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga trendnya meningkat, dari tahun 2012 sebesar 40,03 persen menjadi 54,01 persen pada tahun 2016. Namun demikian, kondisi tersebut belum sebanding dengan capaian Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah antara lain disebabkan belum tuntasnya program pendidikan menengah universal karena terkait dengan kemiskinan dan tingkat perekonomian masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja). Capaian Angka Partisipasi Sekolah sebagaimana Gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Gambar 2.8
Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

Pada jenjang Sekolah Menengah (SM), capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2012 APK SM sebesar 55,81 persen dan pada tahun 2016 menjadi 74,20 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SM juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, APM SM sederajat sebesar 36,02 persen dan pada tahun 2016 menjadi 49,17 persen. Perkembangan APK dan APM SM sederajat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan APK dan APM SM
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Angka Partisipasi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APK	55,81	61,76	63,16	66,70	74,20
2	APM	36,02	41,18	41,22	45,18	49,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

2) **Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk menunjukkan jumlah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan SMA/SMK/MA mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah.

Pada kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2016, jumlah SMA sederajat meningkat dari 49 unit menjadi 56 unit, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2012 sejumlah 43.081 jiwa dan meningkat menjadi 44.511 jiwa pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah per 10.000 penduduk pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 11,37 menjadi 12,58 pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA sederajat
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah SMA sederajat	49	53	53	55	56
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	43.081	43.267	44.328	44.783	44.511
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	11,37	12,25	11,96	12,28	12,58

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

3) **Rasio Guru terhadap Siswa**

Pada tahun 2012 rasio guru terhadap siswa menurun dari 15,40 menjadi 18,08 pada tahun 2016. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap siswa cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Rasio guru terhadap murid dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25
Rasio Guru Terhadap Siswa SMA sederajat
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

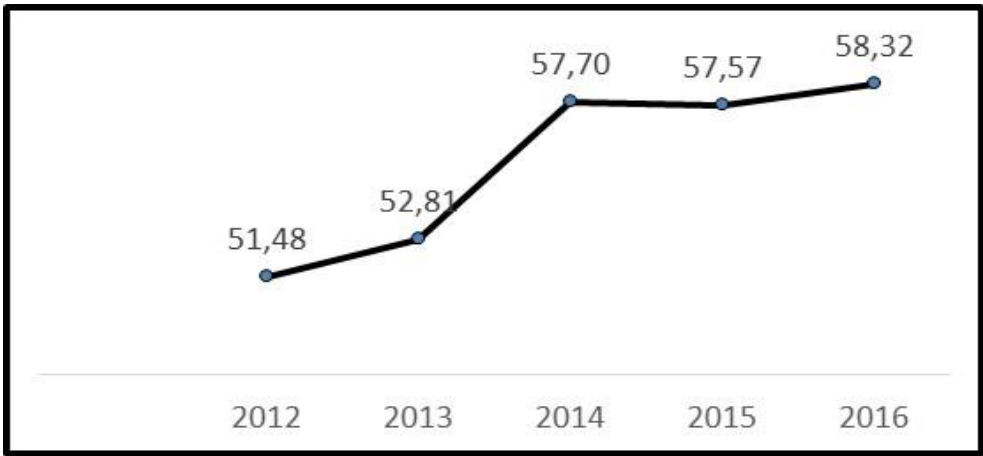
Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Guru	1.561	1.423	1.681	1.769	1.827
Jumlah Siswa	24.045	26.720	27.998	29.869	33.029
Rasio	15,40	18,782	16,66	16,88	18,08

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

c. **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan pendidikan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

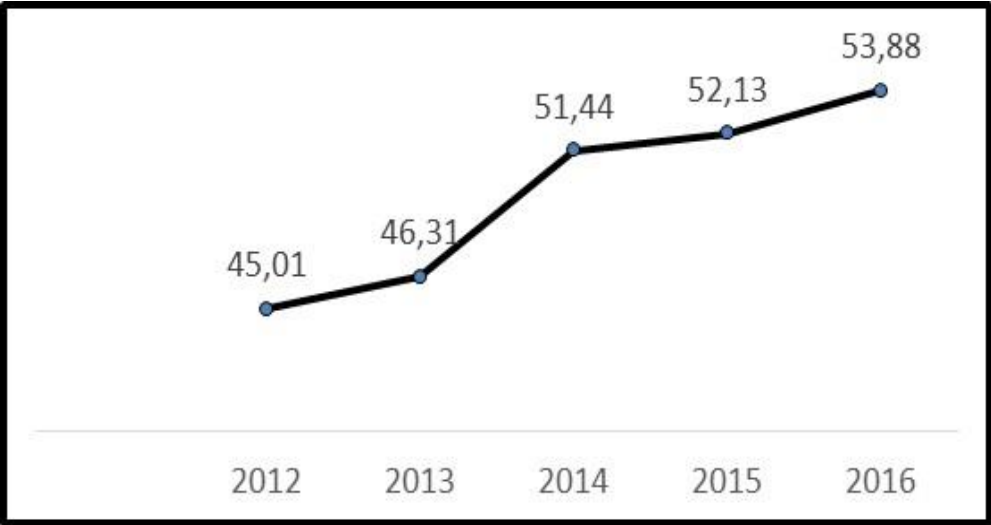
Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian APK dan APM PAUD APK Kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2016 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012 capaian APK PAUD sebesar 51,48 persen, dan meningkat menjadi 58,32 persen pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Prubalingga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Gambar 2.9
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

APM Kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2016 terus meningkat. Pada tahun 2012 capaian APM PAUD sebesar 45,01 persen, dan meningkat menjadi 53,88 persen pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Hal tersebut sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Gambar 2.10
Angka Partisipasi Murni PAUD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) dan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI, tahun 2012 sebesar 0,65 persen (681 anak) dan menurun menjadi 0,32 persen (325 anak). Selanjutnya untuk jenjang SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2012 sebesar 0,29 persen (129 anak) dan menjadi 0,44 persen (199 anak) pada tahun 2016. Selanjutnya untuk jenjang SMA sederajat, angka putus sekolah tahun 2012 sebesar 0,29 persen (68 anak) dan pada tahun 2016 menjadi 0,79 persen (236 anak). Angka putus sekolah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Jenjang	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/SDLB	0,65	0,24	0,22	0,24	0,32
2	SMP/MTs/SMPLB	0,29	0,70	0,91	0,61	0,44
3	SMA/SMK/MA	0,29	0,96	0,80	0,77	0,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

e. **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2012 -2016 mengalami fluktuasi. Angka kelulusan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 2.27
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Jenjang	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/SDLB	99,61	99,91	99,97	99,99	99,70
2	SMP/MTs/SMPLB	99,48	99,96	99,99	99,75	99,45
3	SMA/SMK/MA	99,52	99,90	99,97	99,96	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

2. **Kesehatan**

a. **Angka Kesakitan**

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada satu bulan sebelum pencacahan atau angka kesakitan. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan.

Hasil Susenas 2015 pada tabel 2.28 menunjukkan bahwa sebanyak 19,26 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga telah mengalami keluhan kesehatan mulai dari panas, batuk, pilek, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lain-lain. Ini berarti bahwa pada satu bulan sebelum pencacahan ada sebanyak 19,26 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami gangguan kesehatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dilihat dari angka kesakitan tahun 2014 yang lebih rendah yaitu 16,50 persen.

Tabel 2.28
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2014- 2015

Rincian	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Angka Kesakitan 2014	16,28	16,72	16,50
Angka Kesakitan 2015	19,50	19,03	19,26

Sumber : Susenas 2014-2015

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2015, laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda yaitu laki-laki 19,50 persen dan perempuan 19,03 persen. Laki-laki sedikit lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan perempuan.

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada tahun 2014 dimana perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 16,72 persen sementara laki-laki 16,28 persen. Namun secara umum kondisi ini lebih baik dibanding tahun 2015.

b. Lamanya Sakit

Untuk melihat tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk, maka dapat dilihat dari lamanya hari terganggu. Lama terganggu merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai intensitas keluhan kesehatan (penyakit) yang dirasakan oleh masyarakat. Menurunnya angka kesakitan tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama terganggu. Semakin lama (hari) terganggu, maka keluhan kesehatan yang dialami masyarakat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Tabel 2.29 menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu selama sebulan yang lalu menurut lamanya hari terganggu.

Hasil Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa kisaran rata-rata lama terganggu berada dibawah 8 hari dengan persentase terbanyak dibawah 4 hari yaitu sekitar 56,78 persen dari penduduk yang terganggu kesehatannya. Hal ini dapat mengindikasikan secara umum bahwa penyakit yang banyak diderita penduduk adalah penyakit-penyakit ringan sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu
Menurut Lamanya Terganggu dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2015

Lamanya Terganggu (Hari)	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
< 4	54,13	59,43	56,78
4 - 7	31,26	25,26	28,26
8 - 14	3,97	4,44	4,20
15 - 21	4,13	2,57	3,35
22 - 30	6,51	8,30	7,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015

Pada rata-rata lama terganggu kesehatannya di bawah 4 hari, proporsi perempuan yang menderita penyakit lebih banyak dibanding laki-laki yaitu perempuan 59,43 persen sementara laki-laki 54,13 persen. Sedangkan untuk rata-rata lama terganggu 4-7 hari, persentase laki-laki yang terganggu kesehatannya lebih tinggi dari perempuan yaitu laki-laki 31,26 persen dan perempuan 25,26 persen. Pada lama terganggu 22-30 hari yang biasanya adalah penyakit berat dan menahun, kaum perempuan sedikit lebih rentan dilihat dari persentase perempuan yang menyatakan terganggu sebanyak 8,30 persen, lebih tinggi dari laki-laki yang hanya 6,51 persen.

c. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel 2.30 menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Penduduk yang berobat jalan pada tahun 2015 tercatat 55,01 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2014 sebanyak 56,97 persen.

Tabel 2.30
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2014- 2015

Rincian	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Berobat Jalan (%)	50,25	52,94	56,97	56,98	53,70	55,01
Tidak berobat jalan (%)	49,75	47,06	43,03	43,02	46,30	44,99

Sumber : Susenas 2014, 2015

Berdasarkan jenis kelamin terlihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih cenderung untuk berobat jalan ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki. Tercatat perempuan 56,98 persen yang berobat jalan dibandingkan laki-laki hanya 52,94 persen pada tahun 2015.

Jika dilihat dari persentase penduduk yang berobat jalan, di tahun 2015 masih terdapat 44,99 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Kemungkinan yang dilakukan masyarakatadalah mengobati sendiri penyakitnya atau merasa tidak perlu untuk mengobati penyakitnya. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Dengan semakin membanjirnya obat-obatan yang beredar bebas di pasaran dan semakin gencarnya promosi atau iklan obat di media cetak maupun elektronik serta semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengatasi penyakitnya. Masyarakat cenderung mengobati sendiri penyakitnya dengan cara mengkonsumsi obat yang dibeli dari apotik ataupun toko obat terutama untuk penyakit-penyakit ringan.

Dari tabel 2.31 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri penyakitnya yaitu tercatat 68,55 persen dengan rincian laki-laki 66,86 persen dan perempuan 70,31 persen.

Tabel 2.31
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2015

Alasan Tidak Berobat Jalan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak punya biaya berobat	4,05	3,85	3,95
Tidak ada biaya transport	1,17	0,43	0,81
Tidak ada sarana transport	0,31	0,00	0,16
Mengobati sendiri	66,86	70,31	68,55
Merasa tidak perlu	21,52	20,84	21,19
Lainnya	6,09	4,57	5,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015

Selain itu alasan utama lain penduduk sehingga tidak berobat jalan adalah karena merasa tidak perlu untuk diobati penyakitnya sebanyak 21,19 persen dengan rincian laki-laki 21,52 persen dan perempuan 20,84 persen. Walaupun persentasenya cukup rendah, masih ada penduduk yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transport, tidak ada sarana transport dan lainnya.

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Tabel 2.32 memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan (tempat pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/bidan/ klinik/praktek dokter bersama/ UKBM (65,77 persen), puskesmas/pustu (28,15 persen), rumah sakit pemerintah (4,19 persen), dan rumah sakit swasta (4,27 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya persentasenya sangat kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah cukup baik. Selain itu fenomena ini juga dapat menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga akses masyarakat cukup mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis. Untuk tempat rawat jalan seperti rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, persentasenya tidak terlalu

besar. Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang berada di pusat kota sehingga penduduk yang tinggal di pedesaan lebih cenderung berobat jalan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Tabel 2.32
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2015

Tempat Berobat Jalan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Rumah Sakit Pemerintah	3,66	4,65	4,19
Rumah Sakit Swasta	3,81	4,67	4,27
Praktek Dokter/Bidan/ Klinik/Praktek Dokter Bersama/ UKBM	65,09	66,38	65,77
Puskesmas/Pustu	26,07	29,98	28,15
Praktek Batra/Alternatif	0,79	1,57	1,20
Lainnya	4,66	1,64	3,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015

Derajat kesehatan masyarakat diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu, akses masyarakat juga semakin mudah, murah dan merata terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggalakkan program jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya jaminan kesehatan maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah juga berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.33
Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan
dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2015

Jaminan Kesehatan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
BPJS Kesehatan	8,40	8,98	8,69
BPJS Ketenagakerjaan	0,83	0,65	0,74
Askes/Asabri/Jamsostek	4,57	4,99	4,78
Jamkesmas/PBI	39,49	42,13	40,82
Jamkesda	5,61	6,00	5,81
Asuransi Swasta	0,08	0,18	0,13
Perusahaan/Kantor	0,50	0,29	0,39
Tidak Memiliki	42,56	39,14	40,83

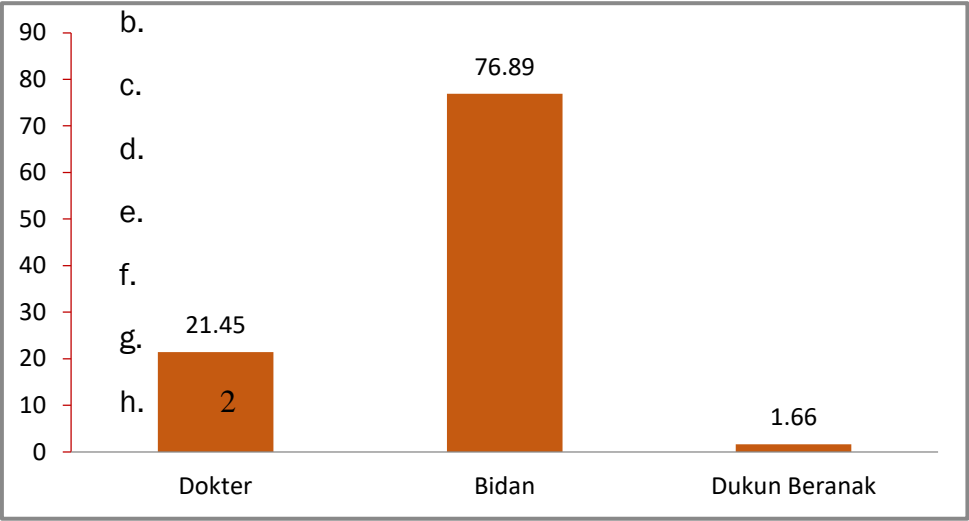
Sumber : Susenas 2015

Tabel 2.33 memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah jamkesmas/PBI sebesar 40,82 persen. Menurut jenis kelamin, komposisi perempuan yang memiliki jamkesmas/PBI lebih banyak dibanding laki-laki yaitu perempuan 42,13 persen dan laki-laki 39,49 persen. Sementara itu masyarakat yang memiliki jamkesda hanya 5,81 persen yang notabene jamkesda adalah jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Untuk BPJS Kesehatan persentasenya masih relatif kecil 8,69 persen.

Secara umum kepemilikan jaminan kesehatan lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Terlihat bahwa 39,14 persen perempuan yang tidak memiliki jaminan kesehatan sementara laki-laki yang tidak memiliki jaminan kesehatan mencapai 42,56 persen.

d. Penolong Kelahiran Terakhir

Selain ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong pasca kelahiran yaitu mengurangi kematian bayi dan kematian ibu (kematian maternal). Pelayanan yang aman dilakukan oleh dokter atau bidan pada saat proses kelahiran bayi.



Gambar 2.11.
Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin
Menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir
Kabupaten Purbalingga, 2015

Pada gambar 2.11 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin di Kabupaten Purbalingga dalam proses kelahiran anaknya ditolong oleh tenaga bidan yaitu sebesar 76,89 persen. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk melahirkan di bidan. Sementara itu perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dokter kandungan sebesar 21,45 persen.

Masih ada 1,66 persen perempuan 15-49 tahun di Kabupaten Purbalingga yang menggunakan tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Ini berarti bahwa tidak sedikit masyarakat Kabupaten Purbalingga yang masih memercayakan penolong proses kelahiran kepada dukun bersalin. Hal ini kemungkinan terjadi di wilayah pedesaan yaitu masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh serta tingkat pemahaman kesehatan yang masih rendah.

Namun secara umum masyarakat lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2015 sudah cukup baik.

e. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI

memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal.

Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas 2015, persentase bayi dibawah usia 2 tahun (baduta 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI sebanyak 97,19 persen dari seluruh baduta di Kabupaten Purbalingga dengan rincian baduta laki-laki 96,57 persen dan baduta perempuan 97,83 persen.Sementara itu baduta yang diberikan ASI eksklusif sebanyak 30,02 persen. Pemberian ASI secara eksklusif diberikan kepada bayi hingga usia 6 bulan. Secara lebih jelas persentase Baduta (0-23 bulan) yang diberi ASI menurut lamanya pemberian ASI dan jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Persentase Baduta (0-23 bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut
Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Lama Pemberian ASI (bulan)	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Disusui	3,43	2,17	2,81
0 – 5	23,17	33,63	28,36
6 – 11	28,65	34,05	31,33
12 – 17	17,09	19,12	18,09
18 – 23	27,66	11,03	19,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Baduta 0-23 bulan yang diberi ASI selama 0-5 bulan sebanyak 28,36 persen yaitu baduta laki-laki 23,17 persen dan balita perempuan 33,63 persen. Untuk pemberian ASI 6-11 bulan persentase baduta laki-laki 28,65 persen dan baduta perempuan 34,06 persen. Sementara itu untuk pemberian ASI dalam kurun waktu 12-17 bulan, persentase baduta laki-laki sebanyak 17,09 persen dan baduta perempuan 19,12 persen. Dan untuk pemberian ASI 18-23 bulan, banyaknya baduta laki-laki 27,66 persen dan baduta perempuan sebanyak 11,03 persen. Secara umum baduta laki-laki lebih lama disusui dibanding baduta perempuan.

f. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2012	22	875.096	1 : 39.777
2013	22	884.683	1 : 40.213
2014	22	894.062	1 : 40.639
2015	22	903.181	1 : 41.054
2016*	22	934.848	1 : 42.493

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu 2012-2016 rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Namun demikian secara umum, berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis tersebut masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.36 di bawah ini.

Tabel 2.36
Perkembangan Rasio Dokter
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2012	61	6,97	27	3,09	24	2,74
2013	88	9,95	31	3,50	17	1,92
2014	48	5,37	43	4,81	15	1,68
2015	94	10,41	21	2,33	17	1,88
2016	88	9,41	21	2,25	17	1,82

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016

h. **Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk**

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 -2016 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.37 di bawah ini.

Tabel 2.37
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

Tahun	Perawat		Bidan		Ahli Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2012	415	47,42	354	40,45	38	4,34
2013	415	46,91	354	40,01	38	4,30
2014	455	50,89	345	38,59	33	3,69
2015	455	50,38	218	24,14	33	3,65
2016	455	48,67	218	23,32	33	3,53

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016 (diolah)

3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. **Pekerjaan Umum**

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Drainase, Persampahan. Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang cukup rendah. Capaian fokus pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan sebagai berikut.

1) **Jembatan dan Jalan**

Jalan merupakan infrastruktur/prasarana dasar yang mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 5,5$ m mencapai 7,05% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,45%. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sudah mencapai 888,087 km. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 75,96% pada tahun 2012 menjadi sebesar 86,44% pada tahun 2016. Kerusakan jalan antara lain disebabkan

karena kondisi tanah yang cenderung labil (daya dukung tanah/DDT kurang) sehingga tidak mampu memikul beban lalu-lintas, dan kerusakan akibat aliran permukaan (*run off*) yang tidak tertampung drainase namun meluap di atas permukaan jalan, serta kerusakan yang disebabkan oleh beban/tonase kendaraan yang seringkali melebihi tonase jalan yang diijinkan sesuai kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan. Adapun perkembangan panjang jalan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.38.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Panjang jalan	Km	710,204	710,204	710,204	783,933	888,087
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	75,96	80,70	86,57	85,27	86,44

Sumber data : DPU Kabupaten Purbalingga

2) Drainase

Drainase atau saluran air permukaan merupakan salah satu infrastruktur/prasarana dasar yang dirancang bangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, dan sehat serta keberlanjutan.Fungsi utama drainase adalah untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah tanah) dan atau bangunan resapan. Kondisi jaringan drainase di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	20	45,45	45,45	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	2,10	10,02	10,56	10,87	9,56

Sumber : DPU Kabupaten Purbalingga

Drainase di Kabupaten Purbalingga perlu direncanakan secara sistematis dalam lingkup kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan, bangunan gedung dan permukiman sesuai karakteristik lingkungannya. Pada tahun 2012 drainase dalam kondisi baik baru mencapai 20% dan meningkat menjadi 45,45% pada tahun 2016, namun masih dibawah target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan masih banyak saluran drainase dalam kondisi rusak, bahkan terdapat drainase yang tidak berfungsi.

Kerusakan maupun penurunan fungsi drainase perlu segera mendapat penanganan secara teknis dan terintegrasi. Penurunan fungsi drainase sangat berpengaruh terhadap daya angkut air/pengaliran air permukaan yang dapat menyebabkan genangan, banjir maupun berimbas pada kerusakan jalan, bangunan drainase itu sendiri, bangunan gedung, maupun lingkungan sekitar. Perencanaan teknis drainase yang terintegrasi dengan sistem penyediaan kebutuhan infrastruktur suatu wilayah dapat menjadi solusi untuk mengendalikan air permukaan/run off, sehingga mampu menghadirkan lingkungan hidup yang aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

3) Sumber Daya Air

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah, guna mendukung layanan penyediaan kebutuhan air bersih dan air irigasi pertanian. Namun potensi sumber daya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk irigasi pertanian berdasar capaian kinerja pada indikator rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2012-2016 tidak mengalami perubahan/peningkatan yaitu 17,2 m/ha, sedangkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 33,9 % pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 53,1% pada tahun 2013, dan menurun menjadi hanya sebesar 36,6 % dan 38,1% pada tahun 2014 dan 2015. Tahun 2016 naik menjadi 41,56%. Selanjutnya dilihat dari ketersediaannya air irigasi untuk pertanian mengalami peningkatan, pada tahun 2014 ketersediaan air irigasi untuk pertanian mencapai angka 68%, dan pada tahun 2015 mencapai sebesar 70%, dan pada tahun 2016 mencapai 75%. Perkembangan jaringan irigasi dan ketersediaan air irigasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Ketersediaan Air Irigasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
2.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	33,9	53,1	36,6	38,1	41,56
3.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	64	66	68	70	75

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

b. Penataan Ruang

Hampir semua kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga telah memiliki RDTRK. Namun demikian, hasil evaluasi dan revieu RTRW ada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga dengan muatan materi dalam RTRW sebesar 13,22 persen, dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik baru 19,13 persen sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Persentase
1	Bobot Ketidaksesuaian Penataan Ruang	13,22
2	Ketersediaan RTH Publik	19,13

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki kewenangan penyediaan perumahan bagi korban bencana, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kinerja pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti luas kawasan kumuh, Persentase rumah tidak layak huni; Persentase rumah tangga bersanitasi; Persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2012-2016 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Cakupan sanitasi dan air bersih sudah baik dengan capaian lebih dari 70% pada tahun 2013, dan pada tahun 2016 sebesar 82,78%. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik. Kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas kawasan kumuh	%	0	0	32,39	32,39	23,70
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	94	13.814	24.315	25.577	27.537
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,001	4,7%	6,5%	11,40	11,41
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%		74,89	69,8	70,00	78,58
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%		98,48	77,48	78,55	82,78

Sumber: DPU Kabupaten Purbalingga

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2013 – 2016 mengalami trend meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2013 sebesar 91 persen, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 92 persen dan kembali meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2015. Selanjutnya meningkat pada tahun 2016 sebesar 94,40 persen. Sementara angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2014 menjadi 3 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1 persen.

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat petugas Satpol PP dalam 24 jam sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama kurun waktu 2011 – 2015 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satpol PP didukung sejumlah aparat. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Satpol PP secara keseluruhan sebanyak 99 orang, dengan rasio per 10.000 penduduk adalah 1.09. Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Sampai dengan tahun 2016, jumlah tenaga linmas sebanyak 5.506 orang. Rasio linmas per 10.000 penduduk saat ini sebanyak 60.97. Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling, tahun 2016 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 6.80.

Kebebasan berorganisasi di masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari jumlah LSM (Lembaga swadaya masyarakat) dan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	92	92	93	93
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	91	92	93	94,40
3.	Angka kriminalitas	Kasus	392	368	188	NA
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	274	304	135	NA
		%	69,90	82,61	71,81	NA
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	162	162	162	162
6.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,5	0,75	0,95	1,09
7.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	63.15	61.76	60.97	60.97
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskam-ling	3.58	3.85	6.80	6.80

Sumber : Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga

6. Sosial

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama, pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan

pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan bidang sosial, sarana dan prasarana bidang sosial dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang jumlahnya cukup banyak, tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 118, 922 orang dan yang sudah menerima bantuan sebanyak 27.764 orang atau sebesar 23,26 persen yang tertangani.

Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memenuhi seluruh target. Penyebabnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program bantuan PMKS yang ada. Meskipun jumlah panti sosial meningkat, namun belum mampu mengatasi masalah PMKS yang juga terus meningkat jumlahnya. Panti sosial yang adapun membebankan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Partisipasi swasta dalam bentuk CSR juga belum banyak bergerak mewadahi jumlah PMKS tersebut.

B. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas periode tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat dari 64,76% menjadi 68,79%. Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 430.097 orang menjadi 479.808 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.44
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga, 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2012	466.188	641.356	72,69
2	2013	337.714	642.988	52,52
3	2014	443.845	659.371	67,31
4	2015	430.097	664.192	64,76
5	2016*	479.808	697.402	68,79

Sumber: Purbalingga dalam Angka, 2016 (diolah)

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut
Jenis Kelamin Tahun 2015-2016

Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016*
Laki-laki	83,81	85,48
Perempuan	53,02	55,61
Total	68,05	70,62

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, 2016 (diolah)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2015 dan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016

Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016*
Laki-laki	6,86	6,43
Perempuan	1,79	1,52
Total	4,84	4,66

Sumber : Purbalingga dalam Angka, 2016 (diolah)

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari 16,89% menjadi 37,05%. Namun demikian pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 46,43% (2011) menjadi 10,54%. Hal tersebut, secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2012	4.971	524	10,54
2013	13.959	3.128	22,41
2014	12.012	4.450	37,05
2015	12.913	4.138	32,05
2016*	13.558	4.345	32,04

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2017 (diolah)

e. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Indikator yang mengukur tingkat kesempatan kerja penduduk adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu perbandingan penduduk usia kerja yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebesar 64,76% dan tahun 2016 sebesar 68,79%.

Penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja, 64,76 persennya adalah lulusan SD ke bawah termasuk diantaranya tidak/belum pernah sekolah sebesar 54,38 persen. Jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 21,71 persen, berpendidikan SLTA 17,36 persen sedangkan yang berpendidikan diploma hingga srata 2 hanya 3,03 persen. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Jujmlah penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel 2.48 berikut ini.

Tabel 2.48
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Tidak/belum sekolah	14.881	-	14.881
Tidak/belum tamat SD	84.484	467	84.951
SD/MI	134501	4.526	139.027
SLTP	93395	4.151	97.546
SLTA	37.863	3.419	41.282
SMK	36.813	7.758	44.571
DI/DII/DIII/S1	9.184	-	9.184
S2, S3	18.976	1.537	20.513
Jumlah	430.097	21.858	451.955

Sumber :Purbalingga Dalam Angka, 2016

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalingga bekerja di lapangan usaha industri yaitu sebesar 29,66 persen, lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan 23,96 persen, lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 22,06 persen, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 10,79 persen dan lapangan usaha lainnya 13,53 persen.

Industri merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini sebanyak 29,66 persen. Besarnya persentase lapangan usaha ini terutama disumbang oleh peran serta perempuan yang bekerja di sektor ini sebanyak 50,10 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki hanya 15,35 persen. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Untuk lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 32,39 persen sementara penduduk perempuan hanya 11,92 persen. Sementara untuk lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki 19,95 persen dan perempuan 25,08 persen. Persentase Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha utama dan jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Persentase Penduduk Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Lk+Pr
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	32,39	11,92	23,96
Industri	15,35	50,10	29,66
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	19,95	25,08	22,06
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	9,68	12,37	10,79
Lainnya	22,63	0,52	13,53
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2015

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada tabel 2.50 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sejumlah 170.878 orang yang terdiri dari laki-laki 71.835 orang dan perempuan 99.043 orang.

Tabel 2.50
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
Berusaha sendiri	43.546	19.399	62.945
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	64.530	23.876	88.406
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	12.179	4.490	16.669
Buruh/Karyawan/Pegawai	71.835	99.043	170.878
Pekerja Bebas	44.948	4.528	49.476
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	15.940	25.783	41.723
Jumlah	252.978	177.119	430.097

Sumber : Purbalingga dalam Angka, 2016

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan

periode tahun 2014. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.51 di bawah ini.

Tabel 2.51
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (15-64 tahun) (orang)	315.485	314.665	318.028	334.840	340.126
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	184.842	199.920	325.745	195.415	177.199
3	Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja (%)	58,59	63,53	102,43	58,36	52,09

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016

b. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian karena pada tahun 2016 angkanya meningkat cukup signifikan, sehingga diperlukan langkah – langkah antisipatif dari segenap pihak yang terkait. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sampai dengan 2016 digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber: Dinsos, Dalduk, KB, P3A, 2017

Gambar 2.12
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2016 di Kabupaten Purbalingga seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Uraian dan Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,06	1,02	1,03
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	149.915	143.826	148.456
3	Persentase kepesertaan KB	79,47%	76,40%	77,96%
4	Jumlah peserta aktif KB pria	5.233	4.593	2.735
5	Cakupan peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalence Rate	153.419	143.826	148.456
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	5	1	1
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, 2017

Data Dinsosdalduk KB dan P3A menunjukkan bahwa Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebaliknya jumlah keluarga prasejahtera mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Keluarga sesuai NKKBS
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Uraian dan Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	86.358	86.790	88.005	89.924
2	Jumlah keluarga pra sejahtera	73.935	71.844	71.948	70.439
3	Jumlah keluarga sejahtera I	54.124	58.112	57.910	62.790
4	Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III+)	73.774	80.843	81.135	160.996

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, 2017

4. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan

pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan;(d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

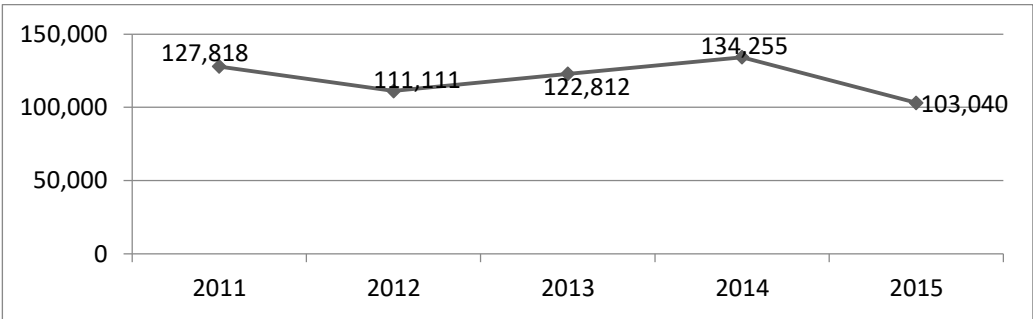
Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan, dari 127.818 orang di tahun 2011 menjadi 103.040 orang pada tahun 2015 atau turun sebesar 19,38%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	127.818	111,111	122.812	134.255	103.040

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2011-2015

Adapun kecenderungan tingkat penurunnya sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2011-2015

Gambar 2.13
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

5. **Pertanahan**

Pelayanan umum kepa masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.55
Luas Wilayah dirinci Menurut Penggunaan Tanah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015

Penggunaan Tanah	2014		2015	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sawah	21.849	28,1	21.845	28,1
Perkampungan	19.083	24,54	19.087	24,54
Kebun Campur	4.532	5,83	4.532	5,83
Tegalan	17.344	22,3	17.344	22,3
Perkebunan	16	0,02	16	0,02
Perikanan	95	0,12	95	0,12
Hutan	11.328	14,57	11.328	14,57
Lain-lain	3.516	4,52	3.516	4,52
Jumlah	77.764	100,00	77.764	100,00

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2015

6. **Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.56
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100%	100%	100%

Sumber: BLH Kabupaten Purbalingga, 2016

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah Kepala Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Penerbitan Kepala Keluarga (KK)			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	Kemangkon	17,123	3,605	20,728	16,870	3,257	20,127	97.10
2	Bukateja	19,986	4,192	24,178	19,770	3,867	23,637	97.76
3	Kejobong	13,950	2,485	16,435	13,751	2,188	15,939	96.98
4	Kaligondang	17,241	3,870	21,111	17,114	3,652	20,766	98.37
5	Purbalingga	15,680	3,586	19,266	15,519	3,394	18,913	98.17
6	Kalimanah	15,006	2,716	17,722	14,808	2,462	17,270	97.45
7	Kutasari	16,806	2,794	19,600	16,622	2,509	19,131	97.61
8	Mrebet	20,966	3,256	24,222	20,646	2,808	23,454	96.83
9	Bobotsari	14,513	2,758	17,271	14,312	2,512	16,824	97.41
10	Karangreja	12,399	1,142	13,541	12,258	894	13,152	97.13
11	Karanganyar	10,700	2,129	12,829	10,524	1,938	12,462	97.14
12	Karangmoncol	14,791	2,536	17,327	14,514	2,090	16,604	95.83
13	Rembang	17,898	2,768	20,666	17,531	2,180	19,711	95.38
14	Bojongsari	15,516	2,814	18,330	15,339	2,520	17,859	97.43
15	Padamara	11,831	1,946	13,777	11,715	1,804	13,519	98.13
16	Pengadegan	10,888	1,845	12,733	10,790	1,713	12,503	98.19
17	Karangjambu	6,655	926	7,581	6,565	738	7,303	96.33
18	Kertanegara	9,234	1,857	11,091	9,138	1,700	10,838	97.72
JUMLAH		261,183	47,225	308,408	257,786	42,226	300,012	97.28

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 308.408 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai akhir 2015 sebanyak 300.012 kepala keluarga atau 97,28%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Kaligondang merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi 98,37% yang diikuti wilayah Kecamatan Pengadegan yakni 98,19%. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Rembang sebanyak 95,38%.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 644.488 jiwa (90,62%) dari wajib KTP sebanyak 711.196 jiwa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.58 berikut ini.

Tabel 2.58
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	Kecamatan	Wajib KTP Kuota	Jumlah Terekam			
			Jml	%	Kurang	%
1	Kemangkon	46,353	41,992	90.59	4,361	9.41
2	Bukateja	55,875	50,965	91.21	4,910	8.79
3	Kejobong	37,127	33,052	89.02	4,075	10.98
4	Kaligondang	46,998	43,450	92.45	3,548	7.55
5	Purbalingga	44,356	40,297	90.85	4,059	9.15
6	Kalimanah	41,739	37,368	89.53	4,371	10.47
7	Kutasari	44,022	39,546	89.83	4,476	10.17
8	Mrebet	56,464	49,458	87.59	7,006	12.41
9	Bobotsari	39,925	36,407	91.19	3,518	8.81
10	Karangreja	32,752	27,793	84.86	4,959	15.14
11	Karanganyar	29,504	26,276	89.06	3,228	10.94
12	Karangmoncol	43,184	37,998	87.99	5,186	12.01
13	Rembang	50,403	44,603	88.49	5,800	11.51
14	Bojongsari	40,868	38,747	94.81	2,121	5.19
15	Padamara	31,001	29,382	94.78	1,619	5.22
16	Pengadegan	27,757	26,478	95.39	1,279	4.61
17	Karangjambu	17,236	16,099	93.40	1,137	6.60
18	Kertanegara	25,632	24,577	95.88	1,055	4.12
Jumlah		711,196	644.488	90,62	66.708	9,38

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase hasil perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 adalah Kecamatan Kertanegara yaitu sebesar 95,88 persen, adapun perekaman terendah adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 84,86 persen. Untuk mengejar capaian perekaman KTP-el di kecamatan perlu ditingkatkan pelayanan KTP-el jemput bola yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

c. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya, setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib dicatat untuk mendapatkan akta pencatatan sipil.

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusanya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dimana terdapat 3 (tiga) item penting yang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

- a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta Pencatatan Sipil;
- b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil.

Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada asas peristiwa menjadi azas domisili dimana penduduk dapat membuat akta pencatatan sipil di tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda. Adapun kepemilikan akta Kelahiran yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Penerbitan Akta Kelahiran per Kecamatan di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	Wilayah	Jumlah Bayi Lahir (Usia < 1 Th)			Jumlah Penerbitan Akta Lahir				Jumlah Akta Lahir Belum Diterbitkan			
		L	P	Jml	L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
1	Kemangkon	246	245	491	230	235	465	94.70	16	10	26	5.30
2	Bukateja	318	309	627	301	296	597	95.22	17	13	30	4.78
3	Kejobong	183	170	353	172	163	335	94.90	11	7	18	5.10
4	Kaligondang	275	245	520	261	236	497	95.58	14	9	23	4.42
5	Purbalingga	234	267	501	223	260	483	96.41	11	7	18	3.59
6	Kalimanah	248	205	453	239	195	434	95.81	9	10	19	4.19
7	Kutasari	247	202	449	241	190	431	95.99	6	12	18	4.01
8	Mrebet	77	101	178	71	97	168	94.38	6	4	10	5.62
9	Bobotsari	64	57	121	61	53	114	94.21	3	4	7	5.79
10	Karangreja	46	37	83	42	34	76	91.57	4	3	7	8.43
11	Karanganyar	40	43	83	37	41	78	93.98	3	2	5	6.02
12	Karangmoncol	53	40	93	49	37	86	92.47	4	3	7	7.53
13	Rembang	75	50	125	71	47	118	94.40	4	3	7	5.60
14	Bojongsari	72	69	141	67	65	132	93.62	5	4	9	6.38
15	Padamara	64	49	113	59	46	105	92.92	5	3	8	7.08
16	Pengadegan	54	61	115	51	57	108	93.91	3	4	7	6.09
17	Karangjambu	21	14	35	19	12	32	91.43	2	2	3	8.57
18	Kertanegara	45	41	86	40	38	78	90.70	5	3	8	9.30
Jumlah		2,362	2,205	4,567	2,234	2,102	4,337	94.96	128	103	230	5.04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah akta kelahiran yang diterbitkan sebanyak 4.337 akta lahir atau sebesar 94,96 persen, sedangkan yang belum diterbitkan sebanyak 230 akta (5,04 persen). Persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Purbalingga yaitu sebanyak 96,41 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kertanegara yaitu sebanyak 90,70 persen.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang

melekat di dalamnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa data kepemilikan akta perkawinan ini hanya bagi penduduk yang beragama non Islam. Sementara bagi penduduk yang beragama Islam data kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk surat nikah berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memutakhirkan kepemilikan akta perkawinan/ surat nikah di Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Keppendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga telah merintis kerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan koneksi database antara KUA di Kecamatan dengan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Purbalingga yang dapat diakses hingga level kabupaten. Data kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam Tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60
Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Purbalingga 2015

No	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Prosentase Kepemilikan Akta Perkawinan
1	490.324	490.965	99,87

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berstatus menikah adalah 490.965 jiwa sementara kepemilikan kutipan akta perkawinan berjumlah 490.324 buah. Dengan demikian, masih terdapat penduduk berstatus nikah tetapi tidak memiliki kutipan akta nikah sebanyak 641 jiwa.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib

disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

9. Perhubungan

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Adapun fasilitas lalu lintas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Fasilitas Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Jalan	
		Provinsi	Kabupaten
1	Marka Jalan	78,6 km	180,872 km
2	Rambu-rambu jalan	551 bh	623 bh
3	RPPJ	71 bh	94 bh
4	Deliniator	105 bh	146 bh
5	Safety Mirror	10 bh	26 bh
6	Guard Raill	1052 m	2844 m
7	Trafficc Light	14 unit	11 unit
8	Warning light	22 unit	25 unit
9	Road Barrier		125 bh
10	Traffic Cone		95 bh
11	Paku Marka	460 buah	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi, di Kabupaten Purbalingga terdapat 2 buah terminal tipe B yaitu Terminal Purbalingga dan Terminal Bobotsari, serta 4 buah terminal tipe C yaitu terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa. Sedangkan untuk pelayanan angkutan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 1.031 kendaraan niaga yag terdiri dari 40 unit angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP); 295 unit angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP); 211 unit angkutan kota; 452 unit angkutan perdesaan; 12 unit angkutan pariwisata; dan 21 unit angkutan antar jemput.

10. Komunikasi dan Informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

11. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya berfluktuatif, tahun 2014 sebanyak 214 unit turun menjadi 174 unit pada tahun 2015 dan naik kembali menjadi 177 unit di tahun 2016. Pemberdayaan koperasi perlu ditingkatkan karena masih ada koperasi yang tidak aktif sebesar 79 unit di tahun 2016. Sedangkan jumlah KUD di Kabupaten Purbalingga cenderung tetap setiap tahunnya yaitu sebanyak 16 KUD, namun demikian jumlah non KUD cukup besar yaitu sebesar 240 unit pada tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung terhadap pemberdayaan UKM lokal, beberapa kebijakan guna pengembangan UKM diantaranya subsidi bunga yang disalurkan lewat lembaga keuangan, program *Bela Beli*, penggunaan batik asli Purbalingga untuk pakaian dinas. Adapun capaian Kinerja Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	25.560	127.549	127.433	127.123
2	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	%	98	99	-	-
3	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,80	1	1,20	1,70
4	Prosentase omset usaha mikro / rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	%	52	54	54,60	54,92
5	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	356	368	390	421
6	Prosentase Koperasi Aktif	%	67	67	69	79
7	Prosentase Koperasi Sehat	%	54	52	59	60

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM , 2016

12. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP selama 4 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2013 sebanyak 4.219 ijin, turun menjadi 4.181 dan 4.016 ditahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi sebesar 4.618 ijin, dan yang diterbitkan paling banyak adalah ijin usaha perdagangan dan ijin usaha perdagangan. Perkembangan capaian kinerja perijinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Perkembangan Capaian Kinerja Perijinan Kabupaten Purbalingga, 2013-2016

No	Jenis Izin	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	1	8	19	10
2	Izin Gangguan (HO)	768	788	787	772
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.249	725	572	641
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	744	731	755	1.004
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	658	751	708	1.016
6	IUI/TDI	4	18	21	30
7	IUI PHHK	-	8	-	-
8	Izin Reklame	718	966	962	913
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	74	145	147	143
10	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	3	10	15	22
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	-	22	9	15
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	21	52
	Jumlah	4.219	4.181	4.016	4.618

Sumber: DMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2017

Adapun perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Realisasi Investasi Tahun 2011 – 2016

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2011	339.768.000.000
2	2012	342.500.000.000
3	2013	477.115.287.000
4	2014	314.812.853.495
5	2015	230.003.281.000
6	2016	483.271.457.226

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

14. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dalam tahun 2016 terdapat kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang berisi 8 kelompok data. Dan juga kegiatan penyediaan data

dasar pembangunan daerah dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan buku evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berisi data-data PDRB, IHK, NTP dan data-data sosial seperti data susenas dan sakernas. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

16. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

17. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar

dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini sebanyak 312 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 255 unit perpustakaan sekolah, 48 unit perpustakaan desa, dan 5 unit perpustakaan lainnya.

18. Kearsipan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2016 sebanyak 240 unit, dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 8000 berkas. SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan, dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 289.295 KK.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari Produksi perikanan Budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2013-2015 terjadi penurunan produksi perikanan kolam dari sebesar 10.896 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 4.872 pada tahun 2015. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya ikan. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,65% dari tahun 2015 atau sebesar 5.001 ton karena adanya kreativitas dalam teknis budidaya .

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan sebanyak 19,9 per kapita pertahun. Kondisi itu masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu. Produksi ikan, tingkat konsumsi ikan, produksi hasil olahan ikan dan jumlah pasar ikan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Produksi Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Hasil Olahan Ikan
Dan Jumlah Pasar Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Produksi Ikan di kolam	Ton	10.896	7.219	4.872	5.001
2	Produksi Ikan di Sungai	Ton	249,24	243,17	249,50	254
3	Produksi ikan di UPR	Ekor (ribu)	365.062	305.068	115.442	116.379
4	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/ kapita/ tahun	16,6	10,73	8,27	8,73
5	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	3.797	2.961	1.590	1.511
6	Jumlah Pasar Ikan	Unit	11	12	12	12

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2017

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan wisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Pariwisata
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	5
2	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	8	9	9	9
3	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	Kelompok	7	9	11	13
4	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Org	1.392.311	1.457.719	1.318.883	1.343.147
5	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	14,00	15,00	17,86	20,97
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,5	2	4
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,735	1,782	1,822	1,753
8	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20
9	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	10	11	11	11

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016 dan Dinporapar Kabupaten Purbalingga

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian. Kewenangan yang dimiliki tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 29,80%. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi padi sebesar 226.707 ton, Jagung 43.095 ton, ubi kayu 62.513 ton, dan kedele hanya 134 ton. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, jagung, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian masih tinggi. Hal ini tentunya perlu dikurangi agar dapat mengurangi pencemaran dan dapat mempertahankan kesuburan tanah pertanian. Secara rinci perkembangan produksi pertanian tanaman pangan, pupuk dan peternakan sebagaimana termuat dalam tabel 2.67 berikut ini.

Tabel 2.67
Perkembangan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan
Penggunaan Pupuk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas)						
	<i>Padi</i>	Ton	209.654	226.819	213.030	219.211	226.707
	Jagung	Ton	51.945	53.248	51.945	35.704	43.095
	Kedele	Ton	823	256	823	201	134
	Ubi kayu	Ton	147.643	149.847	2.556	68.448	62.513
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	55,62	60,99	57,33		
	Padi Sawah	Kw/Ha	58.89	58,97	59,23	56,48	55,79
	Jagung	Kw/Ha	54.79	54,53	54,73	56,34	52,64
	Kedele	Kw/Ha	16.67	16,02	16,11	14,15	15,07
	Ubi kayu	Kw/Ha	299.80	281,06	281,19	272,16	280,07
3	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)						
	Urea	Ton	15.327	15.237	15.237	14.819	15.425
	ZA	Ton	1.098	1.098	1.098	891	865
	SP36	Ton	1.407	1.407	1.407	1.340	1.402
	Phonska	Ton	2.901	2.901	2.901	5.101	5.998
	Organik (Pabrikan)	Ton	732	732	732	3.172	992

Sumber: Dintanbunhut Kabupaten Purbalingga, 2017

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Jumlah ternak sapi potong cenderung mengalami penurunan, tahun 2012 tercatat sebanyak 17.896 ekor turun menjadi sebesar 11.472 ekor di tahun 2016. Sedangkan untuk populasi kambing dan domba mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 populasi ternak kambing berjumlah 295.545 ekor dan pada tahun 2016 naik 33,4% atau menjadi sebanyak menjadi 394.245 ekor. Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah populasi ternak per jenis:						
	Sapi potong	Ekor	17.879	12.904	13.210	13.522	11.472
	Sapi perah	Ekor	83	194	189	116	110
	Kerbau	Ekor	1.537	1.129	1.194	1.152	1.215
	Kambing	ekor	295.545	296.325	293.362	375.471	394.245
	Domba	ekor	45.208	45.329	44.876	56.821	59.662
	Ayam buras	ekor	1.949.465	1.955.465	1.485.104	2.139.738	2.246.725
	Ayam Ras petelur	ekor	895.480	865.600	725.459	738.009	774.909
	Ayam Ras pedaging	ekor	4.940.500	6.500.000	3.470.585	4.570.760	4.799.298
	Itik	ekor	108.846	109.096	99.645	119.326	62.636
	Puyuh	ekor	243.391	106.202	56.128	57.610	82.894
2.	Jumlah produksi hasil peternakan						
	Daging	kg	6.817.619	1.182.394	962.493		
	Telur	ton	3.102	3.003	6.529	5.396	5.835
	Susu	liter	74.825	285.275	268.888	269.941	157.562

Sumber: Dintanbunhut dan Dinakkan Kabupaten Purbalingga, 2017

4. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dilihat berdasarkan statusnya terdiri dari dari hutan negara dan hutan hak. Pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota relatif terbatas, yaitu hanya pada pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa peran dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu melakukan pencegahan kerusakan hutan dan lahan, serta penanganan lahan kritis.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Saat ini luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 14.592 ha. Hutan produksi adalah kawasan

hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga sampai pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2015. Peningkatan khususnya pada jenis kayu jati, pinus, albasia, dan jenis kayu lain. Produksi hutan non kayu juga mengalami peningkatan khususnya pada jenis kayu bakar dan kopal. Peningkatan produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Produksi Hasil Hutan Kayu
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2015

No	Jenis Produksi Hasil Hutan Kayu	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Jati	m3	875.570	1.166,54	3.280,57	2.478,90
2.	Mahoni	m3	1.055	1.610,40	5.713,93	2.157,77
3.	Pinus	m3	1.914,60	2.546,87	4.769,54	18.629
4.	Albasia	m3	7.450,32	8.234,52	258.527,25	176.034
5.	Kayu lain (Rimba campuran)	m3		9.069,99	193.807,74	193.707,76
6.	Jumlah produksi Hasil Hutan Non kayu					
7.	Kayu Bakar	Ton	1.517			
8.	Kopal	Ton	169.394	17,96	2.576	17,96
9.	Getah Pinus	Ton	3.982	753,45	18.342	753,45

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS dan Dintanbunhut

Di Kabupaten Purbalingga, luas lahan kritis di area hutan lindung mencapai 1.157.00 ha, sedangkan Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian sebesar 5.734.00 ha. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka penanganan lahan kritis, baik secara sipil teknis maupun vegetatif, dengan total penanganan mencapai 3.378 hektar atau 49,02% dari luas lahan kritis. Tentunya penanganan lahan kritis ini perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral sangat terbatas, hanya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari

beberapa indikator seperti rasio elektrifikasi, dan Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN.

Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 166.984 rumah tangga pada tahun 2012 meningkat menjadi 215.046 rumah tangga pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 28,8 persen. Meningkatnya kebutuhan listrik diikuti pula dengan peningkatan daya listrik terpasang yang semula sebesar 142.065.896 KVA di tahun 2012 naik menjadi 199.645.416 KVA pada tahun 2016.

Data tahun 2015, rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebesar 81,41%, artinya masih ada 18,59% rumah yang belum terjangkau listrik. Keterbatasan pelayanan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga di wilayah yang agak terpencil menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk meningkatkan ketersediaan listrik pada wilayah yang belum terjangkau PLN, telah dikembangkan pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan. Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN pada tahun 2016 sebanyak 3 unit. Tentunya diperlukan penambahan pembangkit listrik non PLN agar rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Purbalingga, diantaranya berasal dari sumber mata air yang dikelola oleh PDAM. Penyalurannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di dalam Tabel 2.70 termuat data air PDAM yang telah disalurkan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.70.
Jumlah Air PDAM yang Disalurkan, Debit Mata Air dan Debit Sungai di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Air PDAM disalurkan	m ³	7.711.296	8.092.668	8.713.470	8.748.210	9.607.779
2	Debit mata air	m ³ /dtk	699,74	80-1000	80-1000	75 - 975	75 - 975
3	Debit sungai	m ³ /dtk	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33

Sumber : DPU PR Kabupaten Purbalingga.2017

6. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi

Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga, kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh DPMPTSP. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10%.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 1.351.921.888.100,- pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 3.334.842.438.610,- pada tahun 2016. Tentunya jumlah ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator tingkat terlindunginya konsumen yang mencapai 100%, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan. Data perkembangan kondisi perdagangan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Perkembangan Kondisi Perdagangan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penanganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Total nilai ekspor	Rupiah	1.351.921.888.100	1.671.732.496.600	1.877.254.061.453	3.116.675.176.271	3.334.842.438.610
4	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	%	10%	10%	10%	10%	10%
5	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	90%	90%	90%	90%	90%
8	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2017

7. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 41.121 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 42.929 unit pada tahun 2016. Jumlah sentra industri juga menunjukan peningkatan dari sebanyak 191 pada tahun 2012 menjadi 212 pada 2016.

Berkaitan dengan inovasi iptek, jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 609 unit dan meningkat pada tahun 2016 menjadi sebanyak 649 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi selama 5 tahun menunjukkan peningkatan, dari 18,74% pada tahun 2012 menjadi 28,74% di tahun 2016. Berkaitan dengan penggunaan bahan baku, Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 23.115 unit pada tahun 2012 menjadi 25.405 unit pada tahun 2016. Adapun perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Kondisi Perindustrian Kabupaten Purbalingga 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,33%	2,46%	2,83%	3,25	3,72
2	Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	609	632	642	645	649
3	Jumlah penerapan standarisasi produk industri (SNI)	Unit	5	6	7	7	8
4.	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	41.121	39.236	42.108	42.719	42.929
5.	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	1-2	2-2	2-3	2-3	2-3
6.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	18,74	20,96	23,08	26,22	28,74
7.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	37,17	38,89	39,42	41,02	42,18
8.	Jumlah sentra-sentra industri	Unit	191	195	198	205	212
9.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	23.115	24.865	25.120	25.374	25.405

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2017

8. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga 4 (empat) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Pemberangkatan Transmigrasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Pemberangkatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Transmigran Umum	15 KK / 66 jiwa	2 KK/ 5 jiwa	2 KK/ 7 jiwa	10 KK/ 32 jiwa

Sumber : Dinaker Kab. Purbalingga. 2017

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa ukuran untuk menilai tatakelola pemerintahan daerah antara lain kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja sebuah pemerintahan. Indeks kepuasan masyarakat yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 77,96 dan meningkat dari tahun 2015 yakni sebesar 77,6. Sedangkan opini laporan keuangan baru mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang dikecualikan faktor pengelolaan aset.

Indikator kinerja lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada 2 (dua)

tahun terakhir nilai AKIP baru mencapai nilai CC. Selangkapnya nilai akuntabilitas secara rinci tergambar pada tabel dibawah ini

Tabel 2.74.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2015 – 2016

Komponen		Skor		
		2015	2016	Skor Maksimum
1	Perencanaan Kinerja	18,45	17,84	30
2	Pengukuran Kinerja	7,47	9,55	25
3	Pelaporan Kinerja	9,71	8,96	15
4	Evaluasi Internal	5,25	5,62	10
5	Capaian Kinerja	9,32	8,06	20
Nilai Hasil Evaluasi		50,20	50,03	100
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	AA

Sumber : MenPAN dan RB, 2017

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan sebagai cermin tingkat pendapatan per kapita sebulan. Penggunaan data pengeluaran ini disebabkan oleh sulit dan kurang akuratnya data pendapatan.

Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 adalah 649.147 rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 520.635 rupiah per kapita sebulan. Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk yang ditandai dengan adanya inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2015. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 dan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.75.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, 2014-2015

Jenis Pengeluaran	2014		2015	
	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase
Makanan	294.217	56,51	318.784	49,11
Bukan Makanan	226.418	43,49	330.363	50,89
Jumlah	520.635	100,00	649.147	100,00

Sumber : Susenas 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015, sebesar 49,11 persen (318.784 rupiah) pengeluaran penduduk di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 50,89 persen (330.363 rupiah) dikeluarkan untuk kebutuhan bukan makanan. Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan selama kurun waktu 2014-2015 mengalami penurunan dari 56,51 persen pada tahun 2014 menjadi 49,11 persen pada tahun 2015. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan meningkat dari 43,49 persen menjadi 50,89 persen.

Pola pengeluaran penduduk cenderung bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju sebagian besar pengeluaran untuk non makanan. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Jembatan dan Jalan

Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sudah mencapai 888,087 km. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 75,96% pada tahun 2012 menjadi sebesar 86,44% pada tahun 2016. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.76.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Panjang jalan	Km	710,204	710,204	710,204	783,933	888,087
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	75,96	80,70	86,57	85,27	86,44

Sumber : DPU Kabupaten Purbalingga

2. Drainase

Drainase atau saluran air permukaan merupakan salah satu infrastruktur/prasarana dasar yang dirancang bangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih dan sehat serta keberlanjutan. Fungsi utama drainase adalah

untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah tanah) dan atau bangunan resapan. Kondisi jaringan drainase di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.77.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	20	45,45	45,45	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	2,10	10,02	10,56	10,87	9,56

Sumber : DPU Kabupaten Purbalingga

C. Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur umur penduduk sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) dengan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dan penduduk belum produktif (0-14 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Dari seluruh penduduk Kabupaten Purbalingga hasil Susenas 2015, sebanyak 26,85 persen adalah kelompok umur anak-anak (0-14 tahun); 65,21 persen adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan 7,94 persennya adalah kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Dari struktur penduduk, maka dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk sebesar 53,35 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 53 orang penduduk tidak produktif yaitu 41 anak-anak dan 12 orang lansia. Rasio ketergantungan ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 dimana 100 penduduk produktif harus menanggung

beban 55 orang penduduk tidak produktif yaitu 43 anak-anak dan 12 orang lansia. Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 dan 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.78.
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
Kabupaten Purbalingga, 2014 - 2015

Uraian	Tahun	
	2014	2015
Rasio ketergantungan anak	43,40	41,17
Rasio ketergantungan tua	12,22	12,18
Rasio ketergantungan	55,62	53,35

Sumber : Susenas 2014-2015

Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan anak misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda.

2. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk Kabupaten Purbalingga berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 4,17 persen. Penduduk yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar juga relatif masih besar yaitu 24,96 persen. Sedangkan penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 36,30 persen. Dengan perkataan lain, penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 65,43 persen. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/belum sekolah	2,63	5,64	4,17
Tidak/belum tamat SD	24,62	25,28	24,96
SD/ sederajat	36,60	36,01	36,30
SMP/ sederajat	19,01	19,96	19,49
SM/ sederajat	13,67	10,09	11,85
Perguruan Tinggi	3,47	3,02	3,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015

Proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun keterampilan mereka yang cukup minim. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu hanya 3,23 persen.

Secara umum tingkat pendidikan laki-laki lebih baik dari perempuan. Persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD lebih kecil dibandingkan perempuan. Tingkat pendidikan penduduk laki-laki pada SD/ sederajat sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara pada tingkat SMP persentase laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Penduduk laki-laki yang tamat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 36,60 persen sedangkan perempuan 36,01 persen. Untuk penduduk laki-laki yang berpendidikan hingga tingkat SMP/ sederajat sedikit lebih kecil dibanding perempuan yaitu laki-laki 19,01 persen sedangkan perempuan 19,96 persen. Untuk jenjang SM/ sederajat sebesar 13,67 persen penduduk laki-laki telah menamatkan pendidikannya, sementara penduduk perempuan 10,09 persen. Sementara itu, jumlah laki-laki yang menamatkan pendidikannya sampai dengan tingkat perguruan tinggi adalah 3,47 persen sedangkan perempuan yaitu 3,02 persen.

3. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalingga bekerja di lapangan usaha industri yaitu sebesar 29,66 persen, lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan 23,96 persen, lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 22,06 persen, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 10,79 persen dan lapangan usaha lainnya 13,53 persen.

Industri merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini sebanyak 29,66 persen. Besarnya persentase lapangan usaha ini terutama disumbang oleh peran serta perempuan yang bekerja di sektor ini sebanyak 50,10 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki hanya 15,35 persen. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Untuk lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 32,39 persen sementara penduduk perempuan hanya 11,92 persen. Sementara untuk lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki 19,95 persen dan perempuan 25,08 persen.

Tabel 2.80.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2015

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Lk	Pr	Lk+Pr
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	32,39	11,92	23,96
Industri	15,35	50,10	29,66
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	19,95	25,08	22,06
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	9,68	12,37	10,79
Lainnya	22,63	0,52	13,53
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2015

4. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Menurut data hasil Sakernas 2015, penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja, 50,37 persennya adalah lulusan SD ke bawah termasuk diantaranya tidak/belum pernah sekolah. Jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 21,71 persen, berpendidikan SLTA 17,36 persen sedangkan yang berpendidikan diploma hingga Srata 2 hanya 6,55 persen. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian

besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Persentase penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga, 2015

Pendidikan Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak/belum sekolah	2,58	4,71	3,46
Tidak/belum tamat SD	19,47	19,89	19,64
SD/MI	31,66	30,72	31,27
SLTP	22,27	20,92	21,71
SLTA	18,59	15,60	17,36
DI/DII/DIII/S1	1,17	3,52	2,14
S2, S3	4,26	4,63	4,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber :Sakernas. 2015





2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan Realisasi RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian seperti tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.82.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pendidikan Anak Usia Dini								
1.	APK PAUD	%	100	67,70	58,32	86,14	58,32	
2.	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	43	34,5	63,63	184,43	147,98	
Program Wajar Dikdas 9 Tahun								
3.	APK SD/Sederajat	%	110	108	110,34	102,17	100,31	
4.	APM SD/Sederajat	%	93,5	91,5	92,61	101,21	99,05	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
5.	APK SMP/Sederajat	%	100,3	100,15	100,36	100,21	100,06	●
6.	APM SMP/Sederajat	%	72,5	69,8	69,4	99,43	95,72	▼
Program Pendidikan Non Formal								
7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	100	52	40	76,92	40	▼
8.	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	100	22	11	50	11	▼
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
9.	Jumlah Pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional		8	2	1	12,50	12,50	▼
10.	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	%	100	80,5	74,93	74,93	74,93	▼
11.	Persentase sertifikasi pendidik	%	100	78,5	56,93	56,93	56,93	▼
12.	Persentase penduduk lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	100	80	75,84	75,84	75,84	▼
Program Manajemen Pendidikan								
13.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah	%	100	100	100	100	100	●
14.	Persentase akreditasi PAUD	%	45	35	15	33,33	33,33	▼
15.	Persentase akreditasi SD/ Sederajat	%	45	25	60	133,33	133,33	●
16.	Persentase akreditasiSMP/ sederajat	%	85	81	60	70,59	70,59	▼
17.	Cakupan capaian SPM :SD/sederajat	%	98,04	84	83,96	85,64	85,64	▼
18.	Cakupan capain SPM: SMP/ sederajat	%	90,52	77	76,64	84,67	84,67	▼
19.	Persentase angka kelulusan : SD/ sederajat	%	100	99,9	99,7	99,70	99,70	▼
20.	Persentase angka kelulusan SMP/sederajat	%	100	99,96	99,45	99,45	99,45	▼

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
21.	% angka melanjutkan: SD/ sederajat	%	86,07	86,21	99,76	115,91	115,91	●
22.	% angka melanjutkan: SMP/ sederajat	%	84,29	81,29	84,36	100,08	100,08	●
23.	% angka putus sekolah : SD/ sederajat	%	0,17	0,21	0,32	188,24	188,24	●
24	% angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	0,69	0,90	0,44	63,77	63,77	●
25	% angka mengulang:SD/ sederajat	%	4,80	5,3	4,06	84,58	84,58	●
26.	% angka mengulang : SMP/ sederajat	%	0,20	0,24	0,17	85	85	●
27.	Indek integritas UN	%	96	91	90	93,75	93,75	▼

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pendidikan, terlihat bahwa dari 27 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 11 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 15 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

B. Kesehatan

Kinerja Urusan Kesehatan ditunjukkan dalam 69 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program pelayanan KIA, remaja dan Usila								
1.	Angka Kematian Ibu	per 100.000	47	101	104,5	103,47	222,34	<div></div>
2.	Kasus Kematian Bayi	per 1.000	4,1	9,2	8,9	96,74	217,07	<div></div>
3.	Angka Kematian Balita	per 1.000	4,9	10,7	10,8	100,93	220,41	<div></div>

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan								
4.	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	70	60	85,71	60	▼
5.	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	%	100	85	80	94,12	80	▼
Program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan								
6.	Jumlah Puskesmas perawatan	Unit	13	11	11	100	84,62	▶
7.	Jumlah puskesmas mampu bersalin	Unit	22	12	13	108,33	59,09	▶
8.	Jumlah Puskesmas poned	Unit	7	5	5	100	71,43	▶
9.	Jumlah RS Ponek	Unit	2	1	1	100	50	▶
10.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	22	7	4	57,14	18,18	▼
11.	Jumlah RS terakreditasi	Unit	3	1	1	100	33,33	▶
Program perbaikan gizi masyarakat								
12.	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,5	3	3	100	120	●
13.	Cakupan bayi dengan BBLR	%	5	5,3	3	56,60	60	▼
14.	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	●
15.	Cakupan desa/ kelurahan dengan konsumsi beryodium baik	%	100	100	100	100	100	●
Program promosi kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan								
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	●
17.	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	90	90	67,4	74,89	74,89	▼
18.	Cakupan akses jamban keluarga	%	100	80	78,6	98,25	78,60	▼
19.	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	100	80	74,06	92,58	74,06	▼
20.	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	100	70	67,9	97,00	67,90	▼
21.	Cakupan desa open Defecation Free (ODF)	%	100	32	31	96,88	31	▼
22.	Cakupan per rumah tangga ber PHBS	%	93	75	76	101,33	81,72	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
23.	Cakupan Posyandu Mandiri	%	100	60	78,6	131,00	78,60	▶
24.	Cakupan kepesertaan KB aktif	%	95	90	80,5	89,44	84,74	▼
25.	Cakupan rumah sehat	%	80	70	80,5	115,00	100,63	●
26.	Cakupan desa/ kelurahan melakukan STBM	%	100	80	81,6	102	81,60	▶
27.	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	%	100	91	91	100	91	▶
28.	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	85	60	53,2	88,67	62,59	▼
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta kesehatan matra								
29.	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	●
30.	Prevalensi malaria	%	0	0,04	0,03	133,33	70	▶
31.	Case Notification Rate (CNR) TBC per 10.000	%	161	121,2	128	105,58	79,50	▶
32.	Prevalensi HIV/AIDS	%	<0,5	0,001	0,08	1,25	625	●
33.	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	%	100	5,45	100	1834,86	100	●
34.	Angka penemuan kasus baru kusta	Ks	36	24	24	100,00	66,67	▶
35.	Accute Flacid Paralysis (AFP)	Ks	5	4	3	75,00	60,00	▼
36.	Incident Rate DBD per 10.000	ks/10.000	20	27,4	38,2	71,73	52,36	▼
37.	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	1	5	1,2	416,67	83,33	▶
38.	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100	100	108,61	108,61	108,61	●
39.	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100	●
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan								
40.	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	100	100	100	●
41.	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	100	●
42.	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	%	40	10,51	11,96	113,80	29,90	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
43.	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk	%	6	4,92	3,54	71,95	59	▼
44.	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk	%	118	83,66	85,81	102,57	72,72	▶
45.	Rasio bidan per jumlah penduduk	%	77	51,45	49,82	96,83	64,70	▼
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat								
46.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	●
47.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	●
48.	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	100	80	77,33	96,66	77,33	▼
Program Pengawasan Obat dan Makanan								
49	Cakupan pengawasan peredaran obat	%	100	100	100	100	100	●
50.	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	%	100	100	100	100	100	●
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan								
51.	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Unit	23	1	1	100	4,35	▶
52	Cakupan Puskesmas terakreditasi	%	22	7	4	57,14	18,18	▼
53.	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	%	3	1	1	100	33,33	▶
54.	Cakupan pelayanan perijinan/registrasi kesehatan	%	100	100	100	100	100	●
55.	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	100	100	100	100	100	●
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
A. Pelayanan Kesehatan Dasar								
56.	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	Orang/hari	250	200		0,00	0,00	▼
57.	Bed Occupancy Ratio (BOR)		80	55	58,1	105,64	72,63	▶
58.	Net Death Rate (NDR)		10	1	57,4	57,4	57,4	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
59.	Gross Death Rate (GDR)		20	1	99,57	99,57	497,85	●
60.	Length Of Stay (LOS)		9	1	1	100	11,11	▶
61.	Turn Over Interval (TOI)		3	3	2,07	69	69	▼
62.	Bed Turn Over (BTO)		50	50	74,21	148,42	148,42	●
B. Pelayanan Kesehatan Rujukan								
63.	Jumlah layanan rawat jalan Rumah Sakit	orang/hari	250	200	486	243,00	194,40	●
64.	Bed Occupancy Ratio (BOR)		80	80	63,55	79,44	79,44	▼
65.	Net Death Rate (NDR)		10	17	11,67	68,65	116,70	●
66.	Gross Death Rate (GDR)		20	29	20,24	69,79	101,20	●
67.	Length Of Stay (LOS)		9				0,00	▼
68.	Turn Over Interval (TOI)		3	2	1,66	83,00	55,33	▼
69.	Bed Turn Over (BTO)		50	65	80,36	123,63	160,72	●

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Kesehatan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kesehatan, terlihat bahwa sebanyak 69 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 28 target indikator berstatus telah tercapai, 19 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya bahkan ada yang sudah melebihi target pertahunnya, dan 22 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penataan Ruang Daerah								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Doku-men	1	1	1	100	100	●
2.	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	●
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan								
3.	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	●
4.	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Doku-men	1	1	1	100	100	●
Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan								
5.	Jumlah taman kota	Bh	12	10	3	30	25	▼
6.	Luas taman	Ha	5,37	4,57		0	0	▼
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
7.	Penambahan jalan	m	826.186	790.393	811.163	103	98	▶
8.	Jumlah jembatan	unit	275	273	273	100	99	▶
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air								
9.	Persentase bendung dan irigasi kondisi baik	%	40,00	38,70	41,56	107,39	103,90	●
10.	Jumlah bendung	Bh	184	180	180	100	97,83	▶
11.	Jumlah irigasi	Bh	256	256	256	100	100	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan								
12.	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	%	60	30	30	100	50	▶

Keterangan :

- OPD Pengampu DPUPR
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras



Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terlihat bahwa sebanyak 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 2 target indikator

masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada Tabel bawah ini.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan								
1.	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	6,10	10,6	10	96	168	
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman								
2.	Cakupan penanganan prasarana air bersih	%	100	92	82,78	90	83	
3.	Cakupan penanganan prasarana sanitasi	%	100	85	78,58	92	79	

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinperkim
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dalam 13 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
OPD Pengampu BPBD								
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam								
1.	Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100	100	100	<div></div>
2.	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	desa	5	-	-			
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	80	80	60	75	75	<div></div>
4.	Tingkat waktu tanggap	%	75	75	50	67	67	<div></div>
5.	Presentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	85	85	80	94	94	<div></div>
6.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	90	90	75	83	83	<div></div>
OPD Pengampu Kesbangpol								
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik								
7.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	70	-	-	-	-	
8.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg	%	70	-	-	-	-	
9.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres	%	70	-	-	-	-	
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan								
10.	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA	%	NA	NA	NA	NA	NA	
Program Pembinaan Kehidupan Beragama								
11.	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	kgt	215	175	NA	NA	NA	
OPD Pengampu Pol PP								
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.								
12.	Persentase penanganan pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100	<div></div>
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba								
13.	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Keterangan :
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, terlihat bahwa dari 13 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 4 target indikator belum diketahui statusnya dan 4 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD. Sedangkan 3 indikator tidak ada angkanya karena tahun 2016 bukan merupakan tahun pemilukada, pileg dan pilpres.

F. Sosial

Kinerja Urusan Sosial ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial								
1.	Cakupan PMKS yang terlayani	%	100	100	96	96	96	▼
2.	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	●
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
3.	Cakupan LKS yang dibina	%	100	100	100	100	100	●
4.	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	%	100	98	98	100	98	▶
Program Fasilitas, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana								
5.	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	●
6.	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	●

Keterangan :

- OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan tenaga kerja ditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan capaian target RPJMD sebesar 100% atau lebih), sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras (capaian target 2016 kurang dari 100%) dan 2 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih namun capaian target RPJMD belum 100%). Gambaran pencapaian indikator urusan tenaga kerja sampai tahun 2016 sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja								
1	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	75	51	41,24	80,9	54,9	▼
2	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	2	2	1,91	95,5	95,5	▼
B	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial							
3	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	%	95	90	100	111,1	105,2	●
4	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	%	90	75	80,2	106,9	89,1	▶
5	Rasio tenaga kerja terhadap upah sesuai UMK	%	95	80	89,8	112,3	94,5	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinaker
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 5 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Jumlah pekerja dibawah umur	Orang	127	213	237	111,27	186,61	●
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Orang	4	13	50	384,62	1250	●
3.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	4.600	4.373	4606	105,33	100,13	●
4.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	44.592	35.319	33505	94,86	75,14	▼
5.	Tingkat partisipasi perempuan dilembaga politik	Orang	15	15	12	80	80	▼

Keterangan :

- OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A
- ● : Telah Tercapai; ►: Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat bahwa dari 5 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dalam 18 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB								
1.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need KB)	%	9	11,75	17,39	148	193,22	<div></div>

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Drop Out KB	%	15	24	14,23	59,29	94,87	▼
3.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	●
4.	Jml penanganan kasus terkait layanan KB		10	20	1	5	10	▼
5.	Jumlah peserta KB aktif pria	%	5.250	5.125	6635	129,46	126,38	●
Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja								
6.	Persentase kelompok PIK Remaja yg dibina	%	100	100	100	100	100	●
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB								
7.	Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa /kelurahan		1 : 1	1 : 2	1 : 6	106,45	108,2	●
8.	Rasio pembantu keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/ kelurahan		1 : 1	1 : 1	1 : 1	100	100	●
9.	Rasio Sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan		1 : 1	1 : 1	1 : 1	100	100	●
10.	Persentase kelompok Prio Utomo yg dibina	%	100	100	100	100	100	●
Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera								
11.	Jumlah NKKBS		3,6	3,6	3,6	100	100	●
12.	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	%	13,61	13,61	11,69	85,89	85,89	▼
13.	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	%	77,20	77,19	81,41	105,47	105,45	●
14.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	●
15.	- Bina Keluarga Balita	%	34,7	34,34	34,32	99,94	98,9	▼
16.	- Bina Keluarga Remaja	%	25	24,6	24,02	97,64	96,08	▼
17.	- Bina Keluarga Lansia	%	26	25,61	26,64	104,02	102,46	●
18.	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	86,95	86,7	75,06	86,57	86,33	▼

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinsosdaldudk KB P3A
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terlihat bahwa dari 18 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 12 target indikator berstatus telah tercapai, dan 6 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

D. Pangan

Kinerja pembangunan urusan pangan ditunjukkan dalam 10 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 sebesar 100% atau lebih), sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2016 kurang dari 100%). Sedangkan 3 indikator belum teridentifikasi status capaiannya. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016




No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan								
1	Angka Konsumsi Energi	kg/cap / tahun	2.200	2.096 ,96	1.999,2	95,34	90,87	▼
2	Angka Konsumsi Protein	kg/cap / tahun	71,81	57,96	56,7	97,83	78,96	▼
3	Cakupan Kecamatan Rawan Pangan yang tertangani							
4	Cakupan Desa Rawan Pangan yang tertangani							
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		99,51	86,86	85,2	98,09	85,62	▼
6	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	%	99	89	90	101,12	90,91	►
7	Persentase pangan segar bersertifikat prima 3	%	8	3	3	100	37,5	►
Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat								
8	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	30,13	25,94	25	96,38	82,97	▼
9	Cakupan Desa Mandiri Pangan	Desa			4			
10	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton SB	22,5	10	10	100	44,44	►

Keterangan :
- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

E. Pertanian

Kinerja Urusan Pertanian ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Pertanian								
1	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	%	100	50	62,66	125	63	
2	Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	50	50	100	50	
3	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	%	90	80	0	0	0	

Keterangan :

- OPD Pengampu Pertanian
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pertanian, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 2 target indikator akan tercapai (sudah tercapai atau melebihi capaian target tahun 2016 namun belum tercapai di capaian RPJMD) dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

F. Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam 16 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016

No.	Program Indikator kinerja daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem								
1	Jumlah mata air yang dilindungi	Lokasi	13	8	6	75	46,2	▼

No.	Program Indikator kinerja daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
2	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	8	3	1	33	12,5	▼
Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup								
3	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAI,UKL/UPL, SPPL)	Perusa-haan	781	471	471	100	60,3	▶
4	Cakupan Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	Perusa-haan	32	22	20	91	62,5	▼
5	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Perusa-haan	16	11	10	91	62,5	▼
6	Indek Kualitas Udara (minimal 84)	%	85	18	60	333	70,6	▶
7	Indek Kualitas Air (minimal 55)	%	56	52		0	0,0	▼
8	Indek Tutupan Lahan (minimal 62)	%	63	59	59	100	93,7	▶
9	Jumlah kelom[pok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelom-pok	21	16	16	100	76,2	▶
10	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusa-haan	14	9	9	100	64,3	▶
Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3								
11	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	%	90,2	77,5	77,5	100	85,9	▶
12	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	%	73,05	1,4	1,4	100	1,9	▶
13	Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah	%						
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup								
14	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	%	100	80	80	100	80	▶

No.	Program Indikator kinerja daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
15	Jumlah sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan	%	0	0	0	0	0	▼
16	Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	Perusa-haan	180	144	144	100	80	▶

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Lingkungan Hidup
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa dari 16 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 9 target indikator akan tercapai (sudah tercapai atau melebihi capaian target tahun 2016 namun belum tercapai di capaian RPJMD) dan 6 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD. Sedangkan 1 indikator belum ada datanya sehingga belum teridentifikasi status capaiannya.

G. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dalam 4 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penataan Administrasi Kependudukan								
1.	Cakupan kepemilikan KK	KK	100%	306.078	298.908	97,66	97,66	▼
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Org	100%	450.452	485.371	107,75	107,75	●
3.	Tersedianya profil Kependudukan	Buku	100%	50	50	100	100	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
4	K T P	Org	100%	697.654	674.592	96,69	96,69	▼

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinpendukcapil
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terlihat bahwa dari 4 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa								
1.	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●
2.	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	%	100	100	87,87	87,87	87,87	▼
3.	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	desa	90	18	18	100	20	▶
4.	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	RT	5.081	5.081	5.081	100	100	●
5.	Jumlah pasar desa yang dibina	pasar	94	44	34	77,27	36,17	▼
6.	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	●
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7.	Cakupan Posyandu aktif	Unit	1.194	1.194	1.194	100	100	●
8.	Cakupan lumbung desa sehat	Unit	60	12	12	100	20	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
9.	Rasio Karang Taruna aktif	Desa dan kel	224 ds 15 kel	224 desa 15 kel	224 ds 15 kel	100	100	●
10.	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa dan kel	224 ds 15 kel	224 desa 15 kel	224 ds 15 kel	100	100	●
11.	Cakupan BP-SPAM aktif	Klp	50	10	10	100	20	▶
12.	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	Klp	300	60	60	100	20	▶

Keterangan :







- OPD Pengampu Dinpermasdes
- ● : Telah Tercapai; ▶: Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

I. Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas								
1.	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka		1.170	2.025	4.416	218	377	
	Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas :							
2.	Trafic light	Unit		1	1	100		
3.	Warning light	Unit	2	6	6	100	300	
4.	Rambu penunjuk arah	Buah	4	6	9	150	225	
5.	Rambu standar	Buah	100	100	143	143	143	
6.	Guardraill	M	500	500	468	94	94	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
7.	Paku Marka	Bh	100					▼
8.	Trafic cone	Bh	100					▼
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
9.	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)		12.600	12.100	12.548	104	100	▶
10.	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal		177.035	110.000	333.246	303	188	●
11.	Jumlah penumpang terlayani angkutan				1.749.830			▼

Keterangan :





- OPD Pengampu Dinas Perhubungan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 4 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

J. Komunikasi dan Informasi

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi								
1.	Persentase SKPD yang memiliki website	SKPD	43	28	28	100	65	
2.	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah		setiap hari	setiap hari	28 SKPD	28 SKPD	65	
3.	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	SKPD	43	28	28	100	65	
4.	Jumlah pelayanan publik secara online		15	2	2	100	13	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik								
5.	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi		100	600	300	50	300	●
6.	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	Streming	65	18	18	100	28	▶
7.	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	KIM	18	9	9	100	50	▶
8.	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	kali	12	12	12	100	100	●
9.	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	kali	2	2	1	50	50	▼
10	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	kali	30	30	30,0	100	100	●
11.	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	media	20	20	20	100	100	●
12.	Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	naskah	250	250	250	100	100	●

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinkominfo
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras







Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informasi, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

K. Koperasi dan UKM

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditunjukkan dalam 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016, sejumlah 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target RPJMD sebesar 100% atau lebih), 3 indikator perlu perhatian/upaya keras (capaian target tahun

2016 dan target RPJMD kurang dari 100%), serta 2 indikator telah tercapai pada target tahun 2016 dan akan tercapai di target RPJMD. Gambaran pencapaian indikator urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penumbuhan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi								
1	Jumlah Koperasi Sehat		135	110	115	104,5	85,2	
2	Jumlah Anggota Koperasi		52.928	52.428	53.614	102,3	101,3	
Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan daya saing Produk UMKM								
3	Pertumbuhan Jumlah UMKM		129.000	128.133	128.133	100	99,3	
4	Pertumbuhan UMKM Berorientasi Ekspor		45	40	35	87,5	77,8	
Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM								
5	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran		300	125	105	84	35	
6	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet		600	200	170	85	28,3	

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkop UKM
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Target kinerja pembangunan urusan penanaman modal dalam RPJMD 2016-2021 ditunjukkan dalam 8 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 4 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan penanaman modal dan perizinan terpadu sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi								
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)	unit	800	550	661	120,2	82,6	▶
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)	unit	12	2	2	100	16,7	▶







No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
3	Pertumbuhan nilai investasi (baru/Rp.000) PMDN	Rp. (000)	750.000.000	250.000.000	422.072.257	168,8	56,3	▶
4	Pertumbuhan nilai investasi (baru/Rp.000) PMA	Rp. (000)	20.000.000	20.000.000	61.199.200	305,9	305,9	●
5	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	Rp. (000)	770.000.000	270.000.000	483.271.457	178,9	62,7	▶
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu								
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan		82,25	81,35	85,04	104,5	103,4	●
7	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	hari	4,2	5,6	5,6	100	133,3	●
8	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	jenis	24	14	12	85,7	50	▼

- Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkop DPMPTSP
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda								
1.	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Organi-sasi	69	9	9	100	13,04	
2.	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kelompok/ Orang	132	22	22	100	16,67	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
3.	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	piagam	450	10	134	1340	29,78	
4.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	piagam	135	10	24	240	17,78	
5.	Cakupan kelompok/ organisasi olah raga yang difasilitasi	Organisasi	6	1	1	100	16,67	
6.	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi	Kegiatan	195	20	35	175	17,95	

- Keterangan :
- OPD Pengampu Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, semuanya berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya bahkan ada yang melebihi target per tahunnya.

N. Statistik

Kinerja Urusan Statistik ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Real-i-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah								
1.	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	100	100	100	<div></div>

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkominfo (Tahun 2016 OPD Pengampu BAPPEDA)
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Statistik terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

O. Persandian

Kinerja Urusan Persandian ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengelolaan Persandian								
1.	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	<div></div>

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkop Dinkominfo (Tahun 2016 OPD pengampu Setda)
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Persandian terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

P. Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah								
1.	Cakupan kajian seni	%	68	68	11	16,18	16,18	▼
2.	Cakupan fasilitasi seni	%	143	143	20	13,99	13,99	▼
3.	Cakupan gelar seni	%	100	100	76	76	76	▼
4.	Cakupan misi kesenian	%	100	100	56	56	56	▼
5.	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	100	100	100	100	●
6.	Cakupan tempat gelar seni	%	100	100	40	40	40	▼
7.	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	%	307	307	307	100	100	●
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya								
8.	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	%	70	40	40	100	57,14	▶
9.	Jumlah kunjungan museum dan monumen	orang	300.000	250.000	2.167.520	867,01	722,51	●
10.	Jumlah cagar budaya	buah	360	298	298	100	82,78	▶
11.	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	1	100	100	●

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kebudayaan, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 5 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

Q. Perpustakaan

Kinerja Urusan Perpustakaan ditunjukkan dalam 26 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
Jumlah Perpustakaan								
1.	Umum	Bh	2	2	2	100	100	●
2.	Desa/kel	Bh	239	66	68	103,03	28,45	▶
3.	Sekolah/ Madrasah	Bh	811	811	811	100	100	●
4.	Pondok pesantren	Bh	18	3	10	333,33	55,56	▶
5.	Rumah Ibadah	Bh	50	4	15	375	30	▶
6.	Khusus	Bh	12	3	3	100	25	▶
7.	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	%	0,1415	0,1111	0,00011112	0,10	0,08	▼
8.	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk	%	0,125	0,05	0,0337	67,40	26,96	▼
Jumlah perpustakaan yang dibina :								
9.	Umum	Bh	2	2	2	100	100	●
10.	Desa/kel	Bh	108	27	27	100	25	▶
11.	Sekolah/ Madrasah	Bh	518	57	57	100	11	▶
12.	Pondok pesantren	Bh	8	3	3	100	37,5	▶
13.	Rumah Ibadah	Bh	14	5	5	100	35,71	▶
14.	Khusus	Bh	8	3	2	66,67	25	▼
Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar :								
15.	Umum	Bh	1	1	1	100	100	●
16.	Desa/kel	Bh	90	60	50	83,33	55,56	▼
17.	Sekolah/ Madrasah	Bh	622	442	424	95,93	68,17	▼
18.	Pondok pesantren	Bh	18	3	2	66,67	11,11	▼
19.	Rumah Ibadah	Bh	14	4	2	50	14,29	▼
20.	Khusus	Bh	8	3	3	100	37,5	▶
21.	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Bh	98.283	53.283	51.655	96,94	52,56	▼
22.	Jumlah judul buku perpustakaan	Bh	41.857	28.057	27.731	98,84	66,25	▼
23.	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	40.000	15.000	15.000	100	37,5	▶
24.	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Bh	520	370	370	100	71,15	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
25.	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	orang	900	500	500	100	55,56	▶
26.	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	7	2	1	50	14,29	▼

Keterangan :




- OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Perpustakaan, terlihat bahwa dari 26 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 12 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 10 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

R. Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipan ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Arsip								
1.	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	1.247	242	252	104,13	20,21	
2.	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	Berkas	173.500	8.500	8.500	100	4,90	
3.	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	298.295	0	0	0,00	-	

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kearsipan, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai

atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 1 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

2.2.3. **Urusan Pilihan**

A. Kelautan dan Perikanan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dalam 6 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 3 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Perikanan Budidaya								
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	5.293	4.943	5.001	101,2	94,5	▶
2	Produksi Benih Ikan	ekor	137	125	116	92,8	84,7	▼
3	Produksi Ikan Hias	ekor	980	739	2.002	270,9	204,3	●
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
4	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton	3.200	2.850	1.511	53,1	47,2	▼
5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	12	10,80	8,73	80,8	72,7	▼
Program Pengembangan Perikanan Tangkap								
6	Produksi Ikan Sungai	ton	230	240	254	105,8	110,4	●

Keterangan :

- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

B. Pariwisata

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 1 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 4 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator Urusan Pariwisata sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Destinasi Wisata								
1.	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/ dikembangkan	DTW	36	6	4	66,67	11,11	▼
2.	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	27	4	4	100,00	14,81	▶
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata								
3.	Angka kunjungan wisatawan (orang)	orang	15.206.000	1.850.000	1.343.147	72,60	8,83	▼
4.	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	event	18	3	2	66,67	11,11	▼
Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata								
5.	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Kelompok	24	19	15	78,95	62,50	▼



Keterangan :

- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

C. Pertanian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan dalam 51 indikator, sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 5 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 35 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan pertanian sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan								
1	Padi	Ton	265.053	252.189	226.707	90	86	
2	Jagung	Ton	41.759	39.732	43.095	108	103	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
3	Kedelai	Ton	235	223	134	60	57	▼
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura								
4	Ubi Kayu	Ton	78.721	74.901	62.513	83	79	▼
5	Kentang	Ton	4.092	3.893	1.780	46	43	▼
6	Kobis	Ton	3.421	3.255	1.292	40	38	▼
7	Wortel	Ton	2.113	2.010	1.610	80	76	▼
8	Stroberi	Ton	486	462	236	51	49	▼
9	Cabai besar	Ton	764	726	477	66	62	▼
10	Cabai rawit	Ton	607	578	476	82	78	▼
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan								
11	Duku	Ton	8.033	7.643	2.823	37	35	▼
12	Durian	Ton	4.003	3.809	645	17	16	▼
13	Pisang	Ton	14.912	14.189	8.778	62	59	▼
14	Nanas	Ton	433	412	5.677	1378	1311	●
15	Pepaya	Ton	5.071	4.825	2.768	57	55	▼
16	Manggis	Ton	760	723	524	72	69	▼
17	Kapulaga	Ton	12,91	12	641	5220	4965	●
18	Kopi	Ton	614	584	551	94	90	▼
19	Lada	Ton	186	177	182	103	98	▶
20	Kelapa Dalam	Ton	13.432	12.781	12.636	99	94	▼
21	Kelapa Deres	Ton	56.399	53.661	55.156	103	98	▶
22	Cengkeh	Ton	59	57	146	256	247	●
23	Glagah Arjuna	Ton	741	705	385	55	52	▼
24	Nilam	Ton	754	717	828	115	110	●
25	Tebu	Ton	986	938	1.342	143	136	●
26	Karet	Ton	134	127	137	108	102	●
Cakupan Fasilitas Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
27	Power Thresher	Unit	1.050	1.000	973	97	93	▼
28	Pemipil Jagung	Unit	114	64	59	92	52	▼
29	Rice Mill Unit	Unit	451	451	454	101	101	●
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	3.572	3.235	992	31	28	▼
Program Pengembangan Budidaya Peternakan								

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
31	Sapi	Ton	1.300,35	1.237,25	792,051	64	61	▼
32	Kerbau	Ton	1,26	1,2	0,579	48	46	▼
33	Kambing	Ton	294,4	280,11	184,609	66	63	▼
34	Domba	Ton	86,12	81,94	54,481	66	63	▼
35	Kelinci	Ton	0,82	0,78	3,734	479	455	●
36	Babi	Ton	0	0	0	0	0	▼
37	Ayam Layer	Ton	49.694	47.240	491,514	1	1	▼
38	Ayam Broiler	Ton	4.897.006	4.659.376	6.650,462	0	0	▼
39	Ayam Buras	Ton	8.742.751	8.318.504	1.572,708	0	0	▼
40	Itik	Ton	19.998	19.028	68,016	0	0	▼
41	Burung Puyuh	Ton	10.146	9.654	0,669	0	0	▼
42	Angsa	Ton	77	73	0,237	0	0	▼
43	Entog	Ton	5.403	5.141	33,170	1	1	▼
44	Merpati	Ton	1.622	1.543	3,884	0	0	▼
45	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	Liter	305.982	291.131	157.562	54	51	▼
46	Produksi Hasil Peternakan (Telur)	Ton	13.071	12.437	8.059,981	65	62	▼
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian								
47	Produksi Olahan Daging	Ton	456	434	434	100	95	▶
48	Produksi Olahan Telur	Ton	97.963	92.209	93.209	101	95	▶
49	Produksi Olahan Susu	Liter	101.746	95.849	96.807	101	95	▶
Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair								
50	Prevalensi Penyakit	%	17,89	30,29	30,29	100	169	●
51	Penyakit Zoonosis	%	4,54	7,7	8	100	170	●

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Pertanian
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

D. Perdagangan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dalam 11 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD

sebesar 100% atau lebih), dan 6 indikator akan tercapai (capaian target 2016 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan perdagangan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.109.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJM D 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan								
1	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Pasar	3	0	0	0	0	▼
2	Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	PKL	16	6	6	100	37,5	▶
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan								
3	Cakupan pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	Lokasi	3	3	3	100	100	●
Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan								
4	Cakupan pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	Komoditi	3	3	3	100	100	●
5	Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus	Lokasi	44	44	44	100	100	●
6	Cakupan jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Kasus	25	3	9	300	36	▶
7	Cakupan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	32.000	24.066	24.066	100	75,2	▶
8	Cakupan pasar tertib ukur	Pasar	2	1	1	100	50	▶
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								
9	Jumlah eksportir	Perusahaan	29	29	29	100	100	●
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	80	40	40	100	50	▶
11	Nilai ekspor (Milyar)	Rp.	3.800	3.150	3.334,8	105,8	87,7	▶

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinperindag
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

E. Perindustrian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dalam 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD

sebesar 100% atau lebih), dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai target akhir RPJMD. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan perindustrian sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-An	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat								
1	Cakupan fasilitasi HKI	%	100	100	140	140	140	●
2	Cakupan penerapan standarisasi produk industri	%	100	100	0	0	0	▼
3	Cakupan fasilitasi sertifikasi halal	%	100	100	40	40	40	▼

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinperindag
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

F. Transmigrasi

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dalam 1 indikator, terlihat dari 1 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016, berstatus perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai pada target akhir RPJMD. Capaian Urusan Transmigrasi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s.d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capai-an (%)		
Program Ketransmigrasian								
1	Jumlah Calon Transmigran yang difasilitasi	KK	90	15	10	66,7	11,1	▼

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinaker
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap kinerja pembangunan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ditunjukkan dalam 42 indikator, sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2016 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), 6 indikator akan tercapai (targer tahun 2016 sudah tercapai 100% bahkan lebih) dan 12 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai target akhir RPJMD. Sedangkan 5 indikator belum teridentifikasi

status capaiannya. Secara rinci gambaran pencapaian indikator Urusan Pemerintahan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.112.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Tahun 2016

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Real-i-sasi	Capai-an		
Bappelitbangda								
Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	83,3	83,3	83,3	▼
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	100	100	81,4	81,4	81,4	▼
3	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	%	100	65	60	92,31	60	▼
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
4	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	%	100	100	80	80	80	▼
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
5	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	Lem-baga	7	7	7	100	100	●
6	Frekuensi diseminasi hasil litbang	Desi-mina-si	8	4	2	50	25	▼
Inspektorat								
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah								
7	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Unit		108	113	105		
8	Persentase penanganan kasus/khusus	%	100	100	100	100	20	▶
9	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	85	85	75	88	18	▼
10	Level kapabilitas APIP	Ting-kat	5	2	2	100	40	▶
Sekretariat DPRD								
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								
11	Persentase usulan Raperda yang disetujui	%	100	100	100	100	100	●
Sekretariat Daerah								
Program Pembinaan Kehidupan Beragama								
12	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	%	100	175	175	100	175	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
13	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	Pres-tasi	NA					
14	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	Pres-tasi	6					
15	Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi	%	26					
16	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi	keg.	26					
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
17	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		5.219	4.373	4.373	100	83,79	▶
18	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta		31.991	35.319	35.319	100	110,4	●
19	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik		9	15	15	100	166,67	●
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah								
20	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Ang-ka	80,5	78	77,96	99,95	96,84	▼
Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan / Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah/ Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah/Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum								
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Ang-ka	80,5	78	77,96	99,95	96,84	▼
22	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	OPD	45	45	45	100	100	●
23	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Ang-ka	60	51	50,03	98,1	83,38	▼
24	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	%	100	100	100	100	100	●
25	Tingkat capaian bantuan hukum dan penyuluhan hukum	%	100	100	100	100	100	●
26	Tingkat capaian Informasi Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	●
27	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	%	100	100	100	100	100	●
28	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	%	100	100	100	100	100	●
29	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	%	3	3	3	100	100	●
30	Tingkat capaian target laba Perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	45.213.213	28.073.848	28.073.848	100	62,09	▶
31	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu	Rp. 000	22.334.772	13.868.136	13.868.136	100	62,09	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	2016			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
				Tar-get	Realisasi	Capaian		
	rupiah)							
32	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	Unit	224	7	7	100	3,13	▶
33	Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	%	90	90	90	100	100	●
34	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	%	100	100	100	100	100	●
35	Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	%	100	100	100	100	100	●
36	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	%	100	100	100	100	100	●
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
37	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	●
38	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	●
39	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	95	95	95	▼
40	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	%	100	100	95	95	95	▼
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah								
41	Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak	%	100	100	98	98	98	▼
42	Capaian PAD	%	100	100	140,86	140,86	140,86	●

- Keterangan :
- OPD Pengampu Bappelitbangda, Inspektorat, Bakeuda, BKD , Setda dan Setwan
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena

tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan di seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, di luar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2016, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 176,49 ribu orang (19,70 persen) dengan garis kemiskinan sebesar 283.366 perkapita perbulan;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki;
3. Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya serta masih rendahnya pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus;
5. Relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, diantaranya ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta masih rendahnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka. Cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 baru mencapai 11 desa (4,6 persen);
7. Adanya prevalensi HIV-AIDS di tingkat nasional dan khususnya di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi;

8. Masih cukup tingginya pertumbuhan penduduk. Di tahun 2015, pertumbuhan penduduknya mencapai sebesar 1,02 persen. Sedangkan, angka *drop out* KB sebesar 30 persen;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan investasi terkait dengan masih terbatasnya informasi dan promosi investasi serta belum tersedianya pelayanan investasi dan perijinan secara online;
10. Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan yaitu sebesar 87,90;
11. Belum optimalnya peran koperasi dan UMKM dalam penggerak perekonomian daerah terutama dalam kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk;
12. Pengembangan pariwisata belum optimal baik dari sisi kelembagaan dan SDM pengelola terkait dengan daya saing obyek wisata daerah;
13. Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur khususnya jalan, jembatan, prasarana irigasi serta fasilitas umum;
14. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas;
15. Masih cukup rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Data tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang layak;
16. Penanganan persampahan belum optimal, dengan rasio sampah yang ditangani baru sebesar 10 persen;
17. Masih dirasakan adanya penurunan kesetiakawanan sosial serta semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditandai dengan menurunnya semangat gotong royong serta menurunnya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan Negara;
18. Masih perlunya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
19. Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana;

20. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal dan perlu dilakukan kebijakan intervensi yang bersifat afirmatif;
21. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta masih adanya pekerja di bawah umur;
22. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dan belum semua terpetakan khususnya tanah pmda sehingga seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan;
23. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka ancaman degradasi lahan khususnya lahan pertanian tak terelakan;
24. Belum optimalnya efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
25. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik;
26. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga berprestasi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
27. Kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya daerah serta memudarnya nilai adat ketimuran sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari;
28. Semakin menurunnya minat baca masyarakat;
29. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
30. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih dibawah 80 persen, hal ini diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula.

2.4. Lingkungan Strategis

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal. Penjelasan dua lingkungan strategis tersebut sebagai berikut.

2.4.1. Lingkungan Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelemahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan

kekuatan merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga. Adapun yang berfungsi sebagai kekuatan di Kabupaten Purbalingga yaitu:

A. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purbalingga yang menjadi kekuatan yaitu:

1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif memadai;
3. Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan;
4. Pelayanan Perijinan dengan one stop service berstandar ISO14001.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan karena:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi;
2. Tersedianya Kader kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah;
3. Ketersediaan sarana pendidikan yg merata.

C. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi menjadi kekuatan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga karena:

1. Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman;
2. Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN;
3. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Kabupaten Purbalingga merupakan salah daerah agraris dan surplus beras;
5. Memiliki potensi alam yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata;
6. Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

D. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu lingkungan strategis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan karena:

1. Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi di seluruh wilayah;

2. Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang relatif kondusif;
3. Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosial relatif memadai;
4. Ikon Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru.

E. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Bidang Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu factor yang memberikan kekuatan dalam pembangunan daerah karena:

1. Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam pembangunan;
2. Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat;
3. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerja dalam jumlah relatif banyak.

Selanjutnya adalah Faktor Kelemahan. Di samping memiliki kekuatan sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa faktor yang menjadi kelemahan, antara lain:

A. Bidang Pemerintahan

Yang menjadi kelemahan dalam pembangunan daerah dari Bidang Pemerintahan antara lain:

1. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah;
2. Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistem prestasi kerja dalam pembinaan karir PNS;
3. Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas;
4. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan DIV-S1 relatif rendah (48,94 %);
5. Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah;
6. Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan masih relatif rendah;
7. hasil audit BPK menunjukan bahwa tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
8. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah masih bernilai CC;
9. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Yang menjadi kelemahan dalam pembangunan daerah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusan siswa;
2. Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutu pelayanan kesehatan (*quality assurance* belum diterapkan di semua lembaga pelayanan kesehatan);
3. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB; dan
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah.

C. Bidang Infrastruktur

Faktor yang menjadi kelemahan dalam pembangunan daerah dari Bidang Infrastruktur antara lain:

1. Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utama Pulau Jawa (daerah belakang);
2. Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi;
3. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan oleh sungai besar maupun kecil;
4. Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan air baku;
5. Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah;
6. Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah;
7. Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah; dan
9. Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam.

D. Bidang Ekonomi

Dari bidang Ekonomi yang menjadi kelemahan dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani;
2. Relatif rendahnya kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produk, dan akses pasar usaha mikro dan kecil;
3. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
4. Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagi perlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil;

5. Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisional masih belum memadai;
6. Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secara memadai; dan
7. Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal.

E. Bidang Sosial

Kelemahan di bidang Sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1. Kecenderungan munculnya dekadensi moral, seperti adanya penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah dan pornografi di kalangan remaja;
2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa; dan
4. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi.

2.4.2. Lingkungan Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang atau kesempatan dan faktor-faktor ancaman atau tantangan. Faktor Peluang Kabupaten Purbalingga antara lain dilihat dari:

A. Bidang Pemerintahan

Di Bidang Pemerintahan yang menjadi Faktor Peluang dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran belanja Bidang Pendidikan yang cukup tinggi;
3. Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
4. Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkat Desa

B. Bidang Ekonomi

Di Bidang Ekonomi yang menjadi Faktor Peluang dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian;
2. Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional;

3. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikro dan kecil;
4. Banyaknya pemilik modal yang ingin melakukan kegiatan investasi;
5. Tingginya minat masyarakat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik;
6. Sumber Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan
7. Arus Investasi yang semakin meningkat.

C. Bidang Infrastruktur

Di Bidang Infrastruktur yang menjadi Faktor Peluang dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Pembangunan jalan tol Brebes Pemalang dengan *exit tol* di Pemalang;
2. Semakin berkembangnya Purwokerto sebagai kota perdagangan berkembang ke arah *hinterland*; dan
3. *Trend* peningkatan wisata internasional dan nasional.

Selanjutnya, Faktor Eksternal yang menjadi Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari beberapa bidang, antara lain:

A. Bidang Pemerintahan

Di Bidang Pemerintahan yang menjadi Peluang dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat dan proses demokratisasi; dan
2. Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga yang menjadi Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain:

1. Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi;
2. Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan serta kecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi, dan HIV); dan
3. Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria, chikungunya).

C. Bidang Ekonomi

Dari Bidang Ekonomi yang menjadi Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif bagi pengembangan investasi;
2. Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dan tingginya standar kualitas produk;
3. Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produk mancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yang jauh lebih baik dan harga lebih terjangkau;
4. Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/toko modern;
5. Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yang sama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga;
6. Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yang terdidik dan terampil; serta
7. Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi.

D. Bidang Infrastruktur

Dari Bidang Infrastruktur yang menjadi Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Adanya target pencapaian *Sustainabel Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030;
2. Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Perubahan Iklim yang tidak menentu; dan
4. Kerusakan lingkungan dan bencana alam.

E. Bidang Sosial

Dari Bidang Sosial yang menjadi Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk; dan
2. Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yang melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangat nasionalisme dan patriotisme.

2.4.3. Analisis Strategi

Bedasarkan analisis SWOT bisa diketahui bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar yang bisa

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena Kabupaten Purbalingga juga memiliki kelemahan-kelemahan, berikut ancaman lingkungan eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan.

Tabel 2.113.
Matrik Analisis SWOT

No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
FAKTOR INTERNAL				
I. KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)				
A	Bidang Pemerintahan	30%		
1	Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	0,075	4	0,300
2	Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif memadai	0,075	3	0,225
3	Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan	0,075	3	0,225
4	Pelayanan perijinan dengan <i>one stop service</i> berstandar ISO14001	0,075	4	0,300
B	IPM	15%		
1	Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi	0,050	3	0,150
2	Tersedianya kader kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah	0,050	3	0,150
3	Ketersediaan sarana pendidikan yg merata	0,050	3	0,150
C	Bidang Ekonomi	20%		
1	Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN	0,033	4	0,133
2	Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	0,033	4	0,133
3	Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mendorong perekonomian dan pembangunan daerah	0,033	4	0,133
4	Kabupaten Purbalingga merupakan salah daerah agraris dan surplus beras	0,033	4	0,133
5	Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman	0,033	3	0,100
6	Memiliki potensi alam yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata	0,033	3	0,100
D	Bidang Infrastruktur	20%		

No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
1	Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi di seluruh wilayah	0,050	4	0,200
2	Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang relatif kondusif	0,050	3	0,150
3	Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosial relatif memadai	0,050	3	0,150
4	Ikun Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru	0,050	3	0,150
E	Bidang Sosial	15%		
1	Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam pembangunan	0,050	3	0,150
2	Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat	0,050	3	0,150
3	Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerja dalam jumlah relatif banyak	0,050	4	0,200
	Jumlah Nilai kekuatan	1,000		3,383
II. KELEMAHAN (WEAKNESS)				
A	Bidang Pemerintahan	20%		
1	Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistem prestasi kerja dalam pembinaan karir PNS	0,022	3	0,067
2	Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas	0,022	3	0,067
3	Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah	0,022	1	0,022
4	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan DIV-S1 relatif rendah (48,94 %)	0,022	2	0,044
5	Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan relatif rendah	0,022	2	0,044
6	Hasil audit BPK menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	0,022	2	0,044
7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah masih bernilai CC	0,022	2	0,044
8	Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah	0,022	3	0,067

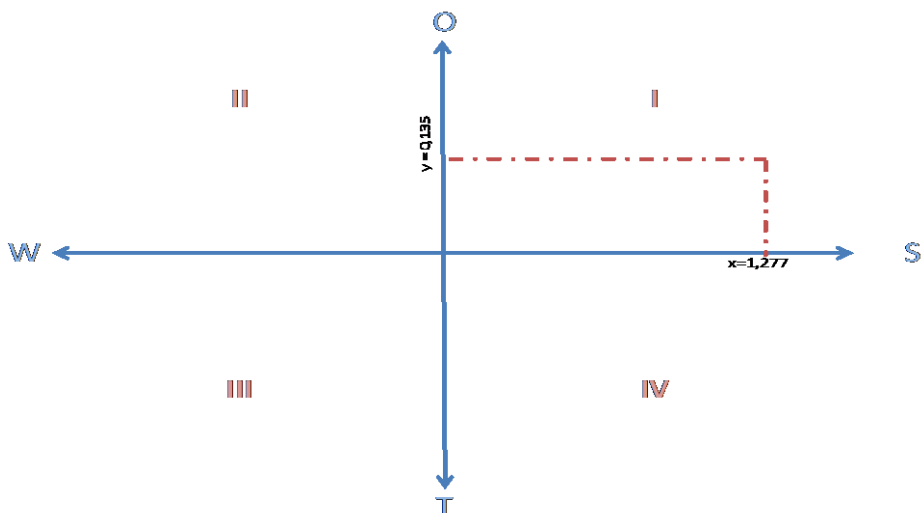
No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
9	Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah	0,022	3	0,067
B	IPM	15%		
1	Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusan siswa	0,038	2	0,075
2	Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutu pelayanan kesehatan	0,038	3	0,113
3	Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB	0,038	2	0,075
4	Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah	0,038	2	0,075
C	Bidang Infrastruktur	25%		
1	Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utama Pulau Jawa	0,028	2	0,056
2	Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi	0,028	3	0,083
3	Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan oleh sungai besar maupun kecil	0,028	1	0,028
4	Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan air baku	0,028	3	0,083
5	Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah	0,028	3	0,083
6	Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah	0,028	2	0,056
7	Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam	0,028	2	0,056
8	Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup	0,028	2	0,056
9	Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah	0,028	2	0,056
D	Bidang Ekonomi	25%		
1	Relatif rendahnya kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produk, dan akses pasar usaha mikro dan kecil	0,036	3	0,107
2	Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	0,036	2	0,071
3	Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagi perlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil	0,036	2	0,071
4	Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisional masih belum memadai	0,036	3	0,107

No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
5	Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani	0,036	3	0,107
6	Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secara memadai	0,036	1	0,036
7	Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya local	0,036	2	0,071
E	Bidang Sosial	15%		
1	Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	0,038	2	0,075
2	Kecenderungan munculnya dekadensi moral	0,038	2	0,075
3	Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi	0,038	1	0,038
4	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum	0,038	1	0,038
	Jumlah Nilai Kelemahan	1,000		2,156
SELISIH NILAI KEKUATAN – KELEMAHAN				1,227
FAKTOR EKSTERNAL				
PELUANG (OPPORTUNITIES)				
A	Bidang Pemerintahan	30%		
1	Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	0,075	3	0,225
2	Komitmen pemerintah dalam penganggaran belanja bidang pendidikan yang cukup tinggi	0,075	3	0,225
3	Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	0,075	2	0,15
4	Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkat desa	0,075	4	0,3
B	Bidang Ekonomi	40%		
1	Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian	0,050	3	0,150
2	Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional	0,050	4	0,200
3	Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikro dan kecil	0,050	3	0,150
4	Banyaknya pemilik modal yang ingin	0,050	3	0,150

No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
	melakukan kegiatan investasi			
5	Tingginya minat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik	0,050	3	0,150
6	Trend peningkatan wisata internasional dan nasional	0,050	2	0,100
7	Sumber keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	0,050	2	0,100
8	Arus investasi yang semakin meningkat	0,050	3	0,150
C	Bidang Infrastruktur	30%		
1	Adanya komitmen untuk mencapai target-target SDG's	0,100	4	0,4
2	Pembangunan jalan tol Brebes Pemalang dengan exit tol di Pemalang	0,100	3	0,3
3	Semakin berkembangnya Purwokerto sebagai kota perdagangan berkembang ke arah hinterland	0,100	3	0,3
	Jumlah Nilai Peluang	1,000		3,05
TANTANGAN (THREATS)				
A	Bidang Pemerintahan	20%		
1	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat dan proses demokratisasi	0,100	2	0,200
2	Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	0,100	2	0,200
B	IPM	20%		
1	Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi	0,067	3	0,200
2	Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria, chikungunya)	0,067	3	0,200
3	Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan serta kecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi, dan HIV)	0,067	3	0,200
C	Bidang Ekonomi	25%		
1	Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif bagi pengembangan investasi	0,036	3	0,107
2	Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dan tingginya standar	0,036	4	0,143

No.	Elemen	Bobot (B)	Tingkat Pengaruh (TP)	Perkalian (B X TP)
	kualitas produk			
3	Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produk mancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yang jauh lebih baik dan harga lebih terjangkau	0,036	3	0,107
4	Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/toko modern	0,036	3	0,107
5	Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yang sama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga	0,036	4	0,143
6	Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yang terdidik dan terampil	0,036	3	0,107
7	Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi	0,036	3	0,107
D	Bidang Infrastruktur	20%		
1	Adanya target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030	0,050	4	0,200
2	Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup	0,050	2	0,100
3	Perubahan Iklim yang tidak menentu	0,050	3	0,150
4	Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam	0,050	3	0,150
E	Bidang Sosial	15%		
1	Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk	0,075	3	0,225
2	Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yang melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangat nasionalisme dan patriotism	0,075	4	0,300
	Jumlah Nilai Tantangan	1,000		2,946
SELISIH NILAI PELUANG – TANTANGAN				0,104

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Matrik Strategi SWOT pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga masuk di kuadran I, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah Strategi Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) atau dikenal dengan strategi SO, yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Secara lebih jelas, strategi dimaksud sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.14
Posisi Strategi SWOT Pembangunan Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan posisi pembangunan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut di atas, perlu disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Secara lebih jelas strategi pembangunan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Analisis SWOT sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.114.
Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisis SWOT

<div>FAKTOR EKSTERNAL</div> <div>FAKTOR INTERNAL</div>	KELEMAHAN	KEKUATAN
PELUANG		<div>1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian;</div> <div>2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;</div> <div>3. Meningkatkan Investasi;</div> <div>4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (<i>good Governance</i>);</div> <div>5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal;</div> <div>6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi;</div> <div>7. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.</div>
TANTANGAN		

Sebagaimana terlihat di dalam tabel di atas, strategi pembangunan daerah Purbalingga berdasarkan analisis SWOT ditekankan pada strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Di dalam strategi ini mencakup:

1. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian;

2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Investasi;
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (good Governance);
5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi; dan
7. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Isu Strategis dan Rekomendasi Pembangunan Daerah

Isu Strategis daerah Kabupaten Purbalingga diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka isu Strategis yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 meliputi:

2.5.1. Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan agar dapat dicapai tujuan pembangunan dan tujuan penyelenggaraan negara sesuai amanat konstitusi.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi kompleks. Dilihat dari aspek penyebab, terjadinya kemiskinan dapat disebabkan karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Penyebab yang bersifat internal antara lain : 1) keterbatasan kondisi fisik seperti kecacatan (termasuk kecacatan mental); 2) terbatasnya kapasitas dan kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya; 3) keterbatasan kepemilikan aset yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. Berdasarkan penyebab yang bersifat eksternal, kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang tidak pro poor ; 2) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya budaya yang tidak produktif; 3) kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kondisi lingkungan alam yang kurang menunjang kehidupan masyarakat seperti tanah yang tandus, rawan bencana dan sebagainya.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu menyentuh akar penyebabnya tidak hanya menangani gejala yang nampak, harus mencakup seluruh strata keluarga miskin dengan sasaran yang jelas dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan dilaksanakan secara terus-menerus. Berdasarkan kondisinya, keluarga miskin dikelompokkan menjadi 4 (empat) klaster. Klaster 1 yaitu keluarga miskin yang tidak memiliki potensi untuk diberdayakan agar mampu melakukan aktivitas produktif seperti misalnya orang lanjut usia yang tidak memiliki pengampu, anak terlantar, penyandang cacat ganda, dan sebagainya. Untuk keluarga miskin klaster 1, satu-satunya intervensi yang harus diberikan oleh pemerintah adalah upaya yang bersifat karitatif yaitu dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat termasuk di dalamnya memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Keluarga miskin klaster 2 adalah keluarga miskin yang masih memungkinkan untuk diberdayakan meskipun dalam skala yang terbatas. Termasuk dalam klaster 2 adalah keluarga miskin dalam usia produktif yang sehat secara jasmani dan mental meskipun tidak memiliki aset produktif atau memiliki dalam skala yang sangat terbatas. Intervensi pemerintah yang dapat diberikan kepada keluarga miskin klaster 2 adalah berupa upaya pemberdayaan yang dilakukan bersamaan dengan upaya karitatif yaitu pemberian bantuan/stimulan bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok, layanan

kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Keluarga miskin klaster 3 adalah keluarga miskin yang memiliki aktivitas produktif meskipun dalam skala mikro sehingga masih memungkinkan untuk dientaskan. Di samping pemberian bantuan stimulan untuk mengurangi beban pengeluarannya, upaya pengentasan keluarga miskin klaster 3 dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan usaha, fasilitasi permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, dan sebagainya. Adapun klaster 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang membutuhkan dukungan dan fasilitasi pemerintah melalui berbagai program pembangunan agar tidak jatuh miskin terutama ketika terjadi gejolak ekonomi yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan hidup pokok.

Di samping intervensi dalam rangka pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, yang paling bersifat strategis adalah upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada anak keturunannya untuk memutus rantai kemiskinan. Agar tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya, anak-anak keluarga miskin harus tercukupi kebutuhan hidupnya secara memadai berupa pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan anak-anak keluarga miskin dapat mengalami tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta cukup memiliki bekal ilmu dan keterampilan sehingga memiliki daya saing untuk memperoleh lapangan pekerjaan atau berusaha secara mandiri.

Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 19,70 persen. Sedangkan pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

2.5.2. Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 66.23 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 67.02. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 68.78 pada tahun 2014 dan 69.49 pada tahun 2015. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 menempati urutan ke-26 se Jawa Tengah, sedangkan capaian IPM tahun 2015 menempati urutan yang ke-27 se Jawa Tengah.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi,

asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan kesehatan. Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 72.80 dan capaian pada tahun 2015 tetap, tidak mengalami kenaikan. Capaian AHH ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 73.88 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 73.98 pada tahun 2015. Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke - 29 / 30 se-Jawa Tengah dan pada tahun 2015 berada pada urutan 30.

Indikator bidang pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya adalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2014 capaian HLS Kabupaten Purbalingga sebesar 11.51 dan meningkat menjadi 11.78 pada tahun 2015. Capaian HLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12.17 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 12.78 pada tahun 2015. Capaian HLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 28 se Jawa Tengah, sedangkan capaian tahun 2015 menempati urutan ke – 31.

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi

penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.84 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 6.85 pada tahun 2015. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.93 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 7.03 pada tahun 2015. Capaian RLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 19 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada urutan ke – 21.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 8.539 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 8.838 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9.640 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9.930 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke-27 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-25.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global, maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Berdasarkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah setingkat SD sampai dengan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (tingkat kesejahteraan 40 persen terendah) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 87.492 anak. Dari jumlah tersebut terdapat 1.970 anak usia sekolah setingkat SD (usia 7 – 12 tahun) yang tidak sekolah (4.46 persen), dan 5.450 anak usia sekolah setingkat SMP (usia 13 – 15 tahun) yang tidak sekolah (22,75 persen). Sedangkan pada usia sekolah SM (usia 16 – 18 tahun) yang tidak sekolah sebanyak 13.265 anak (68.45 persen). Tetapi berdasarkan hasil pendataan inisiatif pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah anak usia sekolah SD yang tidak sekolah sebanyak 1.159 anak, dan anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak.

Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga

kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disamping capaian AHH yang masih rendah, berdasarkan hasil PBDT 2015 masih terdapat 16.150 orang yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya, dari 98.371 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah hasil PBDT 2015, masih terdapat 34.245 rumah tangga atau 34.81 persen yang tidak memiliki akses jamban baik jamban sendiri maupun jamban bersama.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

2.5.3. Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Menurunnya pertumbuhan Sektor Pertanian adalah wajar dan menunjukkan dinamika perekonomian yang positif. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, maka meskipun terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian, pada saatnya akan sampai pada titik maksimal sehingga produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain sektor sekunder dan

tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 persen, lebih rendah dibanding TPT tahun 2013, yaitu sebesar 5,72 persen. Tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka Indeks Gini sebesar 0,32.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek multiplier yang luas dan dapat menjadi prime mover perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

2.5.4. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak

memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

Pengelolaan persampahan merupakan permasalahan penting yang selama ini belum mampu ditangani secara optimal. Saat ini pelayanan persampahan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Jumlah potensi timbulan sampah jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk mencapai 1.942,6 m³ per hari atau 58.278 m³ per bulan atau melebihi volume candi Borobudur (55.000 m³). Besarnya timbulan sampah yang tidak tertangani di samping akan mengganggu keindahan dan kenyamanan juga akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, udara serta gangguan kesehatan dan estetika. Keterbatasan kapasitas penanganan sampah di samping karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sementara dan jumlah tenaga kebersihan yang ada juga karena terbatasnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini.

Berdasar hasil kajian, kapasitas sisa lahan TPA Banjaran pada tahun 2016 tinggal 31.855 m³, tahun 2017 tinggal 17.422 m³, dan tahun 2018 sampai bulan Pebruari tinggal 2.989 m³, sehingga pada tahun 2018 harus dipindah ke lokasi lain atau dilakukan treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas dan/atau merubah manajemen pengelolaan sampah sehingga umur ekonomi TPA dapat diperpanjang. Pemindahan TPA ke lokasi lain dihadapkan pada kesulitan menentukan lokasi baru yang memenuhi syarat teknis serta adanya kendala akses angkutan sampah (jarak tempuh dan kapasitas jalan yang akan dilalui) dan efisiensi dalam operasionalisasinya. Di samping itu, pemindahan TPA juga harus memperhatikan aspek sosiologis, ekologis dan ekonomis agar permasalahan yang terjadi pada TPA yang lama tidak terulang kembali. Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan adalah terkait sistem pengelolaan dan kelembagaan pengelola. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk TPA, perlu implementasi konsep 3 R (reuse, reduce, recycle) mulai dari hulu (tingkat rumah tangga), tingkat kelompok masyarakat, sampai dengan pengelolaan akhir di TPA.

Selama ini pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem *open dumping* yang kemudian pada beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan sistem *controlled landfill* (dan itupun belum dilaksanakan secara konsisten). Kelembagaan pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Apabila permasalahan persampahan tidak segera ditangani secara sistematis, maka dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan semakin sulit untuk dicarikan solusi pemecahannya.

2.5.5. Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama

Salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme.

Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Di sisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai

moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

2.5.6. Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan

berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

2.5.7. Tata Kelola Pemerintahan

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat

skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada tahun 2015 nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik) dengan skor 50,5.

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan merit system. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

